



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

LKIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019





WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bukittinggi Tahun 2019 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan LKIP sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan penuh integritas.



Walikota Bukittinggi
H. M. Ramlan Nurmatias

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja Tahun ke-empat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021. Materi laporan menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama 1 (satu) tahun anggaran Tahun 2019 yang diharapkan mampu menjadi tolak ukur penilaian kinerja secara kuantitatif dan transparan dengan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu.

Substansi laporan ini merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanat yang diterima.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi hingga Tahun 2019 telah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Keberadaan laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja Pemerintahan kedepannya menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya serta monitoring evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata, kami berharap agar laporan kinerja pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Bukittinggi, 10 Maret 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,
Ramlan S.
M. RAMLAN NURMATIAS

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021. Keberhasilan/kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 14 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019.

Dari 22 indikator kinerja utama, sebanyak 10 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori sangat baik, 9 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori baik dan 2 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori cukup dan 1 indikator kinerja mencapai keberhasilan dengan kategori gagal.

Sasaran strategis “**Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya**” yang diukur oleh indikator kinerja **Persentase Puskesmas Terakreditasi** berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 125%. Akan tetapi, sasaran strategis “**Terpenuhinya RTH Kota**” yang diukur oleh indikator kinerja **Persentase RTH Publik** berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar 49.41%.

Rincian pencapaian misi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Misi 1: MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT).

Untuk pencapaian misi 1 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu “Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”. Tujuan misi 1 memiliki 1 sasaran yang diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2 %	2,39 %	119,5%
Rata-rata Capaian Indikator Misi 1						119,5%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja utama adalah 119,5%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 2: MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN.

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
			Peringkat LPPD	35	27	122,86%
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	75%	85,03%	113,37%
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1336	0,1524	114,07%
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 2</i>						110,06%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja utama adalah 110,06%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Penataan Ruang Kota”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhinya RTH Kota	Persentase RTH Publik	17%	8,4%	49,41%
		Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	Persentase Fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	75%	88,12%	117,49%
		Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	Cakupan Akses Air Minum Layak	95%	88,68%	93,34%
3.2	Peningkatan Penataan Ruang Kota	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	Luas kawasan kumuh	0 Ha	0 Ha	100%
			Persentase Sanitasi Layak	100%	96,39%	96,39%
			Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	70%	80,19%	114,56%
Rata-rata Capaian Indikator Misi 3						95,13%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 95,13%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 4: MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA.

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 2 tujuan yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas dan Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran". Tujuan tersebut memiliki 2 sasaran strategis yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,40%	5,88%	91,87%
			PDRB Perkapita	54,50 juta	66,52 juta	122,06%
			Indeks Gini	<0,3	<0,267	89%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3,35	4,6	62,69%
Rata-rata Capaian Indikator Misi 4						91,40%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja utama adalah 91,40%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 5: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 3 tujuan yaitu “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan, Layanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Berkarakter Unggul, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi”. Tujuan tersebut memiliki 6 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan pelayanan pariwisata	Kunjungan Wisatawan	588.245	584.785	99,41%
5.2	Layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter unggul	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	Harapan Lama Sekolah	15 tahun	14,96 tahun	99,73%
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,20	11,32	101,07%
5.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,55	93,11 %
		Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73	74,22	101,67%

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	80%	100%	125%
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 5</i>				103,33%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 103,33%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GRAFIK	XV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pemerintahan Kota Bukittinggi	2
1.3. Sejarah Singkat Kota Bukittinggi	5
Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi	7
Gambaran Umum Daerah	8
1.4. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	9
1.5. Dasar Hukum	20
1.6. Maksud Dan Tujuan.....	21
1.7. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2. 1. Visi Dan Misi	25
Visi	25
Misi	25
Perencanaan Kinerja	26
2.2. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	29
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	30
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	31
<i>Rasio Corporate Social Responsibility</i> Dengan Belanja Langsung	
APBD Dalam Pembiayaan Pembangunan	33
Nilai SAKIP	38
Peringkat LPPD	42
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	47
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	51
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	54
Persentase RTH Publik	59
Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan	62
Cakupan Akses Air Minum Layak	66
Luas Kawasan Kumuh	69
Persentase Sanitasi Layak	73
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	78
Pertumbuhan Ekonomi	82
PDRB Perkapita	85
Indeks Gini	89
Tingkat Kemiskinan	93
Kunjungan Wisatawan	99
Harapan Lama Sekolah	104
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	107
Angka Harapan Hidup	110
Persentase Puskesmas Terakreditasi	116
Laju Pertumbuhan Penduduk	119

3.4 Realisasi Anggaran	123
------------------------------	-----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	124
----------------------	-----

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	125
--	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	29
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	30
Tabel 1.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Tahun 2019.....	33
Tabel 1.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir ...	34
Tabel 1.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	35
Tabel 2.1.1 Perbandingan antara Target Kinerja Nilai SAKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	38
Tabel 2.1.2 Tabel Komponen Penilaian SAKIP.....	38
Tabel 2.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	40
Tabel 2.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	41
Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Peringkat LPPD Tahun 2019	43
Tabel 3.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Peringkat LPPD Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	44
Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Peringkat LPPD Dari Awal RPJMDSampai Dengan Tahun Berjalan	44
Tabel 4.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2019.....	47
Tabel 4.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	48
Tabel 4.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Opini BPK Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan.....	48
Tabel 5.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja IKM Terhadap Layanan Publik Tahun 2019	51
Tabel 5.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKM Terhadap Layanan Publik Tahun 2019dengan Capaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir	52

Tabel 5.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKM Terhadap Layanan Publik Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	53
Tabel 6.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019	54
Tabel 6.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	55
Tabel 6.3.1. Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	55
Tabel 7.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase RTH Publik Tahun 2019	59
Tabel 7.2.1 Perbandingan Realisasi Persentase RTH Publik Capaian Target Tiga Tahun Terakhir	60
Tabel 7.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase RTH Publik Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	60
Tabel 8.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan Tahun 2019	62
Tabel 8.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	63
Tabel 8.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	63
Tabel 9.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Cakupan Akses Air Minum Layak Tahun 2019	66
Tabel 9.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Minum Layak 3 (Tiga) Tahun Terakhir	67
Tabel 9.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Minum Layak Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	67
Tabel 10.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019	69
Tabel 10.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	70
Tabel 10.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	71
Tabel 11.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Sanitasi Layak Tahun 2019	73

Tabel 11.2.1. Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Sanitasi Layak Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	74
Tabel 11.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Persentase Sanitasi Layak Dengan Target RPJMD	75
Tabel 12.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2019	78
Tabel 12.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	78
Tabel 12.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	79
Tabel 13.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019.....	82
Tabel 13.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	83
Tabel 13.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi Dengan Target RPJMD.....	83
Tabel 14.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2019.....	86
Tabel 14.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	86
Tabel 14.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	87
Tabel 14.6.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Kota di Sumatera Barat.....	88
Tabel 15.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2019	89
Tabel 15.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	91
Tabel 15.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	91
Tabel 16.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2019.....	93
Tabel 16.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	94
Tabel 16.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD.....	95

Tabel 16.7.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan Kota Di Sumatera Barat.....	97
Tabel 17.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Kunjungan Wisatawan Tahun 2019.....	99
Tabel 17.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	100
Tabel 17.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD.....	101
Tabel 17.7.1 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan Kota lain di Sumbar.....	102
Tabel 18.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2019.....	104
Tabel 18.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	105
Tabel 18.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD.....	106
Tabel 19.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019.....	107
Tabel 19.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	108
Tabel 19.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Angka Rata-rata Lama Sekolah Dengan Target RPJMD.....	108
Tabel 20.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2019.....	110
Tabel 20.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	111
Tabel 20.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD.....	111
Tabel 21.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Tahun 2019.....	116
Tabel 21.1.2 Predikat Puskesmas Terakreditasi.....	116
Tabel 21.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	117
Tabel 21.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Puskesmas	

Terakreditasi Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD	117
Tabel 22.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019	119
Tabel 22.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	120
Tabel 22.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Target RPJMD	120
Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik Perbandingan Nilai dan Peringkat LPPD Kota Bukittinggi dengan Kota di Sumatera Barat	46
<i>Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kota Di Sumatera Barat dan Nasional</i>	85
Grafik 14.7.1 Perbandingan PDRB/Kapita (juta) Kota Bukittinggi dengan Prov Sumbar dan Nasional	89
Grafik 16.7.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Antar Kota Di Sumatera Barat	97
Grafik 17.7.1 Perbandingan Kunjungan Wisatawan Antar Kota Se Sumatera Barat	103
Grafik 18.7.1 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi dengan Kota Se Sumatera Barat	107
Grafik 20.7.1 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dengan Kota Se Sumbar	115



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja juga menjadi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP telah mendorong percepatan perwujudan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan melalui Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem pemerintahan yang baik. Untuk itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus disusun secara teknis dengan baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dari implementasi kebijakan nasional dan daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk laporan tahun keempat RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, siap untuk disajikan. Keberadaan LKIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan,
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat,
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan,
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;



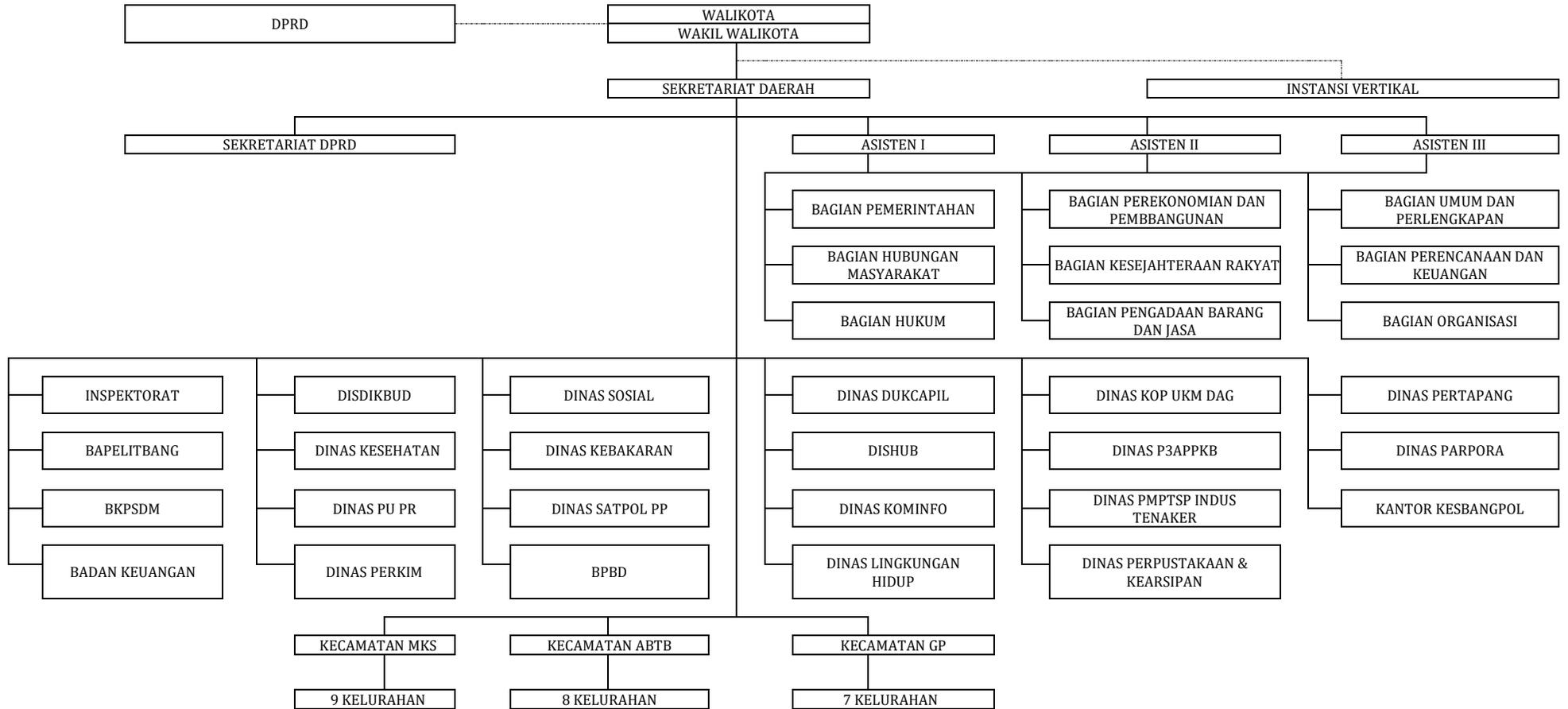
Pemerintah Kota Bukittinggi

10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana;
26. Kecamatan, dipimpin oleh Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 Kelurahan,
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh membawahi 8 Kelurahan,
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :



SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KETERANGAN

- - - - - = KOORDINASI
- _____ = LINE DAN STAF

Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016



1.3. SEJARAH SINGKAT KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat Pemerintahan Sumatera bahagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan, bahkan Bukittinggi pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.

Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan *Gemetelyk Resort* berdasarkan Stbl Tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng "*Fort De Kock*". Kota ini digunakan oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini. Kubu pertahanan Benteng *Fort de Kock* pada tahun 1825 masa Perang Padri kala itu, berkembang menjadi sebuah *Stadsgemeente* (kota) yang kemudian difungsikan sebagai ibukota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke 25 Kenpeitai, dibawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi Bukittinggi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, sekaligus menjadi ibukota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni



1947. Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang. Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Provinsinya, semenjak tahun 1958 secara *de facto* Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang namun secara *de jure* barulah tahun 1978 Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979 yang memindahkan Ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang.

Secara ringkas perkembangan Kota Bukittinggi dapat dilihat melalui uraian sebagai berikut:

a. Pada Masa Penjajahan Belanda

Semula sebagai *Geemete* Fort De Kock dan kemudian menjadi *Staadgemente* Fort De Kock, sebagaimana diatur dalam *Staadblad* No. 358 tahun 1938 yang luas wilayahnya sama dengan wilayah Kota Bukittinggi sekarang.

b. Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa ini Bukittinggi bernama *Shi Yaku Sho* yang wilayahnya lebih luas dari Kota Bukittinggi sekarang ditambah dengan nagari-nagari Sianok, Gadut, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah.

c. Pada Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang:

1. Pada masa permulaan proklamasi, luas wilayah Bukittinggi sama seperti sekarang ini dengan Walikota yang pertama yaitu Bermawi Sutan Rajo Ameh.
2. Kota Bukittinggi dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera No. 391 tanggal 9 Juni 1947 tentang pembentukan Kota Bukittinggi sebagai Kota yang berhak mengatur dirinya sendiri.
3. Kota Besar Bukittinggi sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Bukittinggi dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Pokok tentang Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1960.
4. Kotapraja Bukittinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 jo. Pen. Prs. No. 6 tahun 1959 jo. Pen. prs. No. 5 tahun 1960.



5. Kotamadya Bukittinggi sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

1.3.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

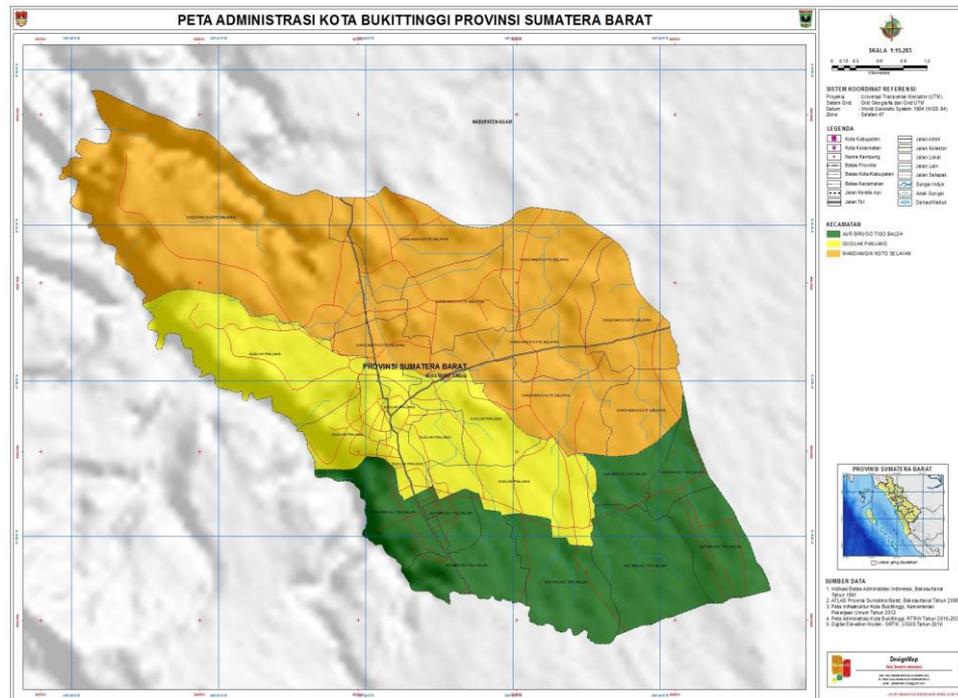
Dalam perkembangannya Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Dearah jo Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.



1.3.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi



Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27	100°, 22' 49" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiangin Koto Selayan	9	12.156	48	100°, 22' 23" BT 0°, 17' 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	25	100°, 23' 22" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS

Sumber Data: BPS 2019



1.4. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan dianalisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

1.4.1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab mekipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat.

Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan

terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negatif yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.



Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

1.4.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalitas aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam kurun periode 5 tahun.



Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau sumber daya manusianya tidak memadai, tetap saja akan menjadi kendala besar. *Input* terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda pemerintahan yang tentu saja akan berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi,
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik,
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat,
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.



1.4.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain.

Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur kereta api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang murah dan representatif. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Disamping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.



1.4.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep *green city* juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

1.4.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di



daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya

untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daerah antara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

1.4.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang



merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Hal yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pemerintah di bidang pendidikan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah. Oleh karena itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencapaian 8 (delapan) standar mutu pendidikan.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.



1.4.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 oleh BPS, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 jiwa terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75%. Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 - 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 sampai ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2019, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design Kependudukan telah merinci 5 (lima)



aspek pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan Kuantitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan data base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau ekses dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan.

Urbanisasi berasal dari masyarakat *hinterland* atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km², dan untuk Kecamatan Guguk Panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru.

Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

1.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup



sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan

yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 1.623 orang atau 61.75 % dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 2.628 orang pegawai.

Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa,



persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang - Undang, mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di

lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

1.4.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Sejalan dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai sebuah kesepakatan pembangunan global oleh lebih dari 193 kepala negara yang tergabung didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global yang turut disukseskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemberlakuan SDGs selama 15 tahun tersebut (berlaku sejak 2016 hingga 2030), menghendaki Pemerintah Kota Bukittinggi turut terlibat aktif mensukseskannya dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan Kota Bukittinggi.

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Peluang besar bagi Kota Bukittinggi untuk mensukseskannya dengan kontribusi yang dibangun secara partisipatif. Kontribusi dan partisipasi sendirinya



akan mendorong keadilan prosedural dan keadilan substansial terhadap kebijakan dan program pembangunan hingga mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Agenda SDGs sangat relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun 2019, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

1.5. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
- 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
- 15) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
- 16) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya



penyusunan LKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

I.1. Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKIP SKPD Tahun 2019.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi beserta struktur organisasi SKPD.

I.3. Isu Strategis SKPD

Penjelasan mengenai isu-isu/permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD.

I.4. Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKIP.

Bab II *Perencanaan Kinerja*

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut:

II.1. Rencana Strategis SKPD

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis SKPD yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama tahun 2016-2021.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Menguraikan metodologi pengukuran penghitungan capaian target kinerja.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran

III.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2019 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019;
2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir (2016, 2017 dan 2018);
3. Perbandingan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra SKPD;
4. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan;
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

III.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja SKPD.



IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja SKPD.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi Kota Bukittinggi adalah:

Makna yang terkandung dari visi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat,
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi,
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya,
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi,
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha,
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradab dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

VISI
“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”

2.1.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi



pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

MISI

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat),
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan,
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan,
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna,
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.3. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2019 merupakan tahun keempat implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPd yang lama. Dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya,
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
5. Pengembangan Pariwisata,



6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),
7. Penanggulangan Kemiskinan,
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur,
9. Pelestarian lingkungan hidup.

2.2. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam Pembiayaan Pembangunan	%	2
2	Terlaksananya reformasi birokrasi	2	Nilai SAKIP	nilai	BB
		3	Peringkat LPPD	peringkat	35
		4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	nilai	WTP
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	nilai	75
		6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	13,36
3	Terpenuhinya RTH Kota	7	Persentase RTH Publik	%	17
4	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	8	Persentase Fasilitas Publik Yang Memenuhi Standar Lingkungan	%	75
5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9	Cakupan Akses Air Minum Layak	%	95



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
		10	Luas Kawasan Kumuh	%	0
		11	Persentase Sanitasi Layak	%	100
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	%	70
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,40
		14	PDRB Perkapita	juta	54,40
		15	Indeks Gini	nilai	<0,3
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,35
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17	Kunjungan Wisatawan	orang	588.245
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18	Harapan Lama Sekolah	tahun	15
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	19	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	11,20
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	20	Angka Harapan Hidup	tahun	73
13	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	21	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	80
14	Terkendalinya jumlah penduduk	22	Laju Pertumbuhan Penduduk	nilai	1,45



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 14 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik



3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 14 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2 %	2,39 %	119,5
2	Terlaksanya reformasi birokrasi	2	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		3	Peringkat LPPD	35	27	122,86%
		4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	75%	85,03%	113,37%
		6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1336	0,1524	114,07%
3	Terpenuhinya RTH Kota	7	Persentase RTH Publik	17%	8,4%	49,41%
4	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	8	Persentase Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	75%	88,12%	117,49%
5	Pemenuhan target <i>Universal Access</i> (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9	Cakupan Akses Air Minum Layak	95%	88,68%	93,34%
		10	Luas Kawasan Kumuh	0 ha	0 ha	100%
		11	Persentase Sanitasi Layak	100%	96,39%	96,39%
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	70%	80,13%	114,47%
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13	Pertumbuhan Ekonomi	6,40%	5,88%	91,87%
		14	PDRB Perkapita	54,50 juta	66,52 juta	122,06%
		15	Indeks Gini	<0,3	<0,267	89%
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16	Tingkat Kemiskinan	3,35%	4,6%	62,69%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
1	2	3		4	5	6
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17	Kunjungan Wisatawan	588,245	584.785	99,41%
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18	Harapan Lama Sekolah	15 Tahun	14,96 Tahun	99,73%
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	19	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,20	11,32	101,07%,
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	20	Angka Harapan Hidup	73 Tahun	74,22 Tahun	101,67 %
13	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	21	Persentase Puskesmas Terakreditasi	80 %	100%	125%
14	Terkendalinya jumlah penduduk	22	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,55	93,11%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 22 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 14 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 107,21% sesuai dengan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan **memuaskan**.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI I : MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT)

Sesuai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, misi ini dicapai melalui 1 tujuan dan 1 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh SKPD terkait. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1.1	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1.1.1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1.1 : Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan

Tujuan pertama pada misi 1 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 1.1.1
Meningkatnya Dukungan
Pembiayaan Pemangku
Kepentingan Dalam
Pembangunan



Capaian sasaran strategis 1.1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap satu Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2 %	2.39 %	119.5%

Dari tabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 119,5 %. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

Pencapaian kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi dan nilai capaian seperti rumus berikut ini.



1. RASIO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN BELANJA LANGSUNG APBD DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

<i>Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan</i>	=	$\frac{\text{Jumlah anggaran CSR}}{\text{Jumlah belanja langsung APBD}}$	
	=	$\frac{\text{Rp. 10.678.089.401}}{\text{Rp. 446.972.085.273}}$	2,39%

Sumber Data : Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 1.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio corporate social responsibility dengan belanja langsung apbd dalam pembiayaan pembangunan	2%	2,39%	119,5%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Indikator Kinerja Rasio *Corporate Social Responsibility* dengan Belanja Langsung dalam Pembiayaan Pembangunan adalah sebesar 2,39%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 2%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk tanggungjawab sosial dari perusahaan yang bersifat sukarela terhadap lingkungan sekitar dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berikut kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR tahun 2019:

1. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) oleh PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelatihan dan pembekalan motivasi kewirausahaan PNS yang akan pensiun dan dari PT. Bank Nagari dalam bentuk seragam olahraga bagi PNS yang memasuki masa purna bhakti;
2. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna kegiatan semiloka kearsipan;



3. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) oleh PT. Sarana Multigriya Finansial dengan melakukan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit rumah di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan 6 unit rumah di Kelurahan Pakan Kurai;
4. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bank Nagari untuk dana pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk TK, SD dan SMP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan oleh Bank Indonesia untuk pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam tanaman cabe untuk menurunkan inflasi kepada 4 Kelompok Wanita Tani senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator *Rasio Corporate Social Responsibility* dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Corporate Sosial		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	1	-	-
2017	1.5 %	1.34 %	89.33 %
2018	1.75 %	2.05 %	117.14 %
2019	2 %	2.39 %	119.5 %

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja dengan persentase tertinggi.



1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 1.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	1%	2 %	2,39 %	2,5 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa *Rasio Corporate Social Responsibility* dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan dari awal RPJMD dengan target 1% telah terealisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,39 % dan untuk akhir masa RPJMD ditargetkan sebesar 2,5%.

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan penyaluran dana CSR yang terus meningkat hingga tahun 2019 tidak terlepas dari upaya dan dorongan dari Kepala Daerah yang terus berkomitmen untuk mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan terkait pembangunan Kota Bukittinggi ke berbagai perusahaan dan pihak swasta yang ada di Kota Bukittinggi. Dana CSR yang disalurkan pun turut memenuhi banyak kebutuhan akan pembangunan Kota Bukittinggi baik fisik maupun non fisik.

Hal ini dapat dicapai dengan bergeraknya semua sektor dalam mencari peluang agar pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat juga dibiayai oleh dana CSR. Disamping itu hal ini mengindikasikan semakin baiknya hubungan antara pemerintah dan swasta serta semakin tingginya tanggungjawab dari sektor swasta untuk turut andil dalam pembangunan.

1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan diperolehnya dana CSR, turut berkontribusi terhadap efisiensi dalam pengurangan biaya pemerintah dalam pembangunan karena sebagian biaya sudah diakomodir oleh pihak pemberi dana CSR. Disamping itu peran aktif SKPD terkait dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan di Kota Bukittinggi juga turut membantu dalam perolehan danan CSR ini.



Pada tahun 2019 juga telah diusulkan penyusunan Peraturan Daerah tentang CSR atas inisiatif DPRD Kota Bukittinggi sebagai salah satu bentuk usaha meningkatkan perolehan CSR untuk mendukung Pembangunan di Kota Bukittinggi.

1.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program yang menunjang adalah program pengembangan potensi ekonomi, dengan target sasarannya meningkatkan dukungan informasi penyaluran CSR dari dunia usaha serta meningkatnya potensi dukungan pembiayaan pembangunan dan dunia usaha melalui kegiatan fasilitasi Tim Koordinasi Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

MISI II : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN

Pencapaian misi 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, terdiri dari dua tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2.1.1	Terlaksananya reformasi birokrasi

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 2 akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan pertama pada misi 2 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.1 terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
2.	Peringkat LPPD	35	27	122,85%
3.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
4.	Indeks kepuasan masyarakat	75%	85,03%	113,37%



	terhadap layanan publik			
5.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1336	0,1524	114,07%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja utama sasaran strategis adalah sebesar 110,05%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **memuaskan**.

2. Nilai SAKIP

2.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (BB)}}{\text{BB}}$$

Tabel 2.1.1 Perbandingan antara Target Kinerja Nilai SAKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	BB	BB	100%

Sumber Data: Bagian Organisasi

Hasil evaluasi terhadap SAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 memperoleh nilai 70,84 dengan predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan hasil dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi. Perolehan nilai SAKIP 70,84 menunjukkan hasil dengan kategori **memuaskan**. Ini merupakan bukti bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah bukan hanya terpaku pada penyerapan anggaran tetapi juga fokus pada pencapaian hasil dan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Perkembangan capaian hasil penilaian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58	10,58



D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81	14,27
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39	70,84
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	BB	BB

Sumber Data: Bagian Organisasi

Kesimpulan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya mengintegrasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja sejalan dengan Akuntabilitas Keuangan;
2. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, namun efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belum fokus dalam pencapaian kinerja masih harus ditingkatkan;
3. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan evaluasi tahun 2018, namun perbaikan tersebut belum dilaksanakan secara tuntas sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam implementasi manajemen kinerja;
4. Beberapa catatan penting terkait kualitas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 adalah:
 - a. Masih terdapat Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menggambarkan kinerja (*outcome*) yang diharapkan akan dicapai;
 - b. Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria kualitas yang baik atau SMART, terutama terkait dengan keterukuran (*measurable*) dan relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur serta orientasi hasil;
 - c. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penjabaran kinerja secara berjenjang (*cascading*), namun hasil penjabaran kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang telah ditetapkan;
 - d. Belum seluruh program dan kegiatan pada level OPD berkorelasi langsung dengan sasaran strategis pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - e. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ukuran



- kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai;
- f. Evaluasi program belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi program seharusnya dilakukan oleh penanggungjawab program untuk menilai ketercapaian hasil program maupun berbagai program lintas OPD;
 - g. Telah membangun aplikasi untuk pengumpulan data kinerja dari setiap OPD, namun belum digunakan sebagai media *monitoring* dan evaluasi kinerja. *Monitoring* dan evaluasi program yang dilaksanakan masih fokus pada pemantauan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga belum maksimal untuk memastikan ketercapaian kinerja organisasi secara keseluruhan;
 - h. Laporan Kinerja telah dibuat baik pada level pemerintah Kota maupun pada seluruh OPD, namun sebagian besar Laporan Kinerja OPD belum menggambarkan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan analisis atas capaian kinerja hanya membahas kesimpulan dari berbagai capaian yang diperoleh dan belum mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut serta alternatif strategi untuk pencapaiannya di masa yang akan datang;
 - i. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Inspektorat belum mampu memicu perbaikan akuntabilitas pada OPD secara optimal.

2.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 2.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai SAKIP			
	Target	Realisasi	Kriteria	Capaian Kinerja
2016	CC	CC	Cukup	100%
2017	B	B	Baik	100 %
2018	BB	BB	Sangat Baik	100 %
2019	BB	BB	Sangat Baik	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari nilai SAKIP Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target yang diharapkan sesuai target perjanjian kinerja pada masing-masing tahun berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh nilai SAKIP Kota Bukittinggi sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.



2.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 2.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Nilai SAKIP	C	BB	BB	A

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi nilai BB, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan nilai A, ada satu tingkatan lagi untuk mendapatkan nilai SAKIP A. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam efisiensi anggaran serta perencanaan yang baik dan terintegrasi.

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah komitmen yang sangat kuat dan tinggi dari pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Adanya pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu sehingga menjadikan perencanaan Kota Bukittinggi semakin terarah sesuai dengan *cascadedown* perencanaan. Disamping itu juga peran serta aktif Kepala SKPD beserta seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan SAKIP ini di SKPD masing-masing serta selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Satu lagi yang sangat menentukan pencapaian nilai SAKIP BB oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan dibentuknya TIM SAKIP Kota yang bertugas mendampingi dan membimbing SKPD agar terus melakukan perbaikan baik dokumen maupun implementasinya di lapangan.

2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengawal implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi, salah satu upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Tim Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, yang terdiri dari unsur-unsur Bapelitbang, Bagian



Organisasi Setda dan Inspektorat Kota. Tim ini berperan dalam pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan hingga penyusunan LKIP sehingga SKPD menjadi lebih terarah dalam penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP tersebut. Dengan keberadaan tim ini terjadi pemberdayaan dari sisi SDM yang mengambil peranan dalam mewujudkan dan meningkatkan nilai SAKIP ini kedepannya.

2.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator nilai SAKIP ini antara lain Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan LKIP Kota, kegiatan penyusunan perencanaan pada masing-masing SKPD serta kegiatan reviu LKIP Kota dan SKPD.

2.7. Perbandingan Pencapaian Indikator dengan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 di Propinsi Sumatera Barat, belum satupun Kabupaten/Kota bahkan Propinsi yang mampu memperoleh nilai A. Namun, Kota Bukittinggi adalah salah satu Kabupaten Kota di Sumbar yang mencapai kriteria sangat Baik (BB) disamping Propinsi dan 2 (dua) Kota lainnya yaitu Kota Padang dan Kota Payakumbuh. Telah terjadi peningkatan nilai meskipun peningkatan tersebut belum cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu gambaran bahwa dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi sudah lebih baik dan selalu melakukan perbaikan dalam pencapaian dan mengimplementasikan SAKIP ini.

3. Peringkat LPPD

3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

<i>Peringkat LPPD</i>	=	<i>Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>
	=	<i>3,1668 (Peringkat 27 secara Nasional)</i>

Sumber Data: Bagian Pemerintahan



Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Peringkat LPPD Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peringkat LPPD	35	27	122.86

Sumber Data: Kepmendagri Nomor 118-8840 tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. LPPD yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah.

Hingga laporan ini disusun, peringkat LPPD terakhir yang baru ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017. Untuk tahun 2018 dan 2019 sampai saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 118-8840 tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017, Kota Bukittinggi memperoleh nilai skor evaluasi LPPD sebesar 3,1668 dengan status kinerja Sangat Tinggi berada pada peringkat 27 dari 93 kota se Indonesia. Hasil ini merupakan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017, sedangkan untuk hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 dan 2019 hingga saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga hasil yang dipakai dalam pelaporan ini adalah hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017.

Sementara berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kota Bukittinggi Nomor LHE-413/PW03/3/2019 dan LAP-EKPPD/15/INSP/2019 Tanggal 29 Oktober 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke-5 (lima) dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan skor 3,2258 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018.



3.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Peringkat LPPD dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Peringkat LPPD Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Peringkat LPPD		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	Peringkat 55	Peringkat 29	147,27%
2017	Peringkat 40	Peringkat 27	132,50%
2018	Peringkat 35	Belum ditetapkan	-
2019	Peringkat 35	Belum ditetapkan	-

Sumber data: Bagian Pemerintahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian peringkat LPPD Kota Bukittinggi sejak tahun 2016 mengalami kenaikan ke tahun 2017. Sedangkan untuk peringkat LPPD tahun 2018 dan 2019 belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini.

3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Realisasi capaian indikator peringkat LPPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Peringkat LPPD Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD
Peringkat LPPD	65	27	30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peringkat LPPD tahun 2018 penilaian tahun 2017 telah melebihi peringkat akhir masa RPJMD dengan peringkat 30. Namun berdasarkan tren capaian pada tahun 2017 dan 2018, realisasi capaian indikator Peringkat LPPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 diperkirakan juga mengalami peningkatan sehingga akan semakin melampaui target yang ditetapkan pada masa akhir RPJMD.



3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya yang serius dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dari indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan *self assessment* terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2019 yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
2. Melakukan *interview* langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya;
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Daerah yang terdiri dari Inspektorat, BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dan Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat;
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melakukan penyusunan LPPD ini dibentuk Tim Penyusun LPPD, yang terdiri dari Tim Pengolah Data yang beranggotakan Kasubag Perencanaan SKPD yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dari masing-masing SKPD dan untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Penyusun yang akan menyusun LPPD. Setelah LPPD selesai disusun, selanjutnya akan diserahkan ke SKPD untuk direviu jika terdapat ketidaksesuaian akan diperbaiki dan setelah itu akan dilakukan reviu oleh Inspektorat.



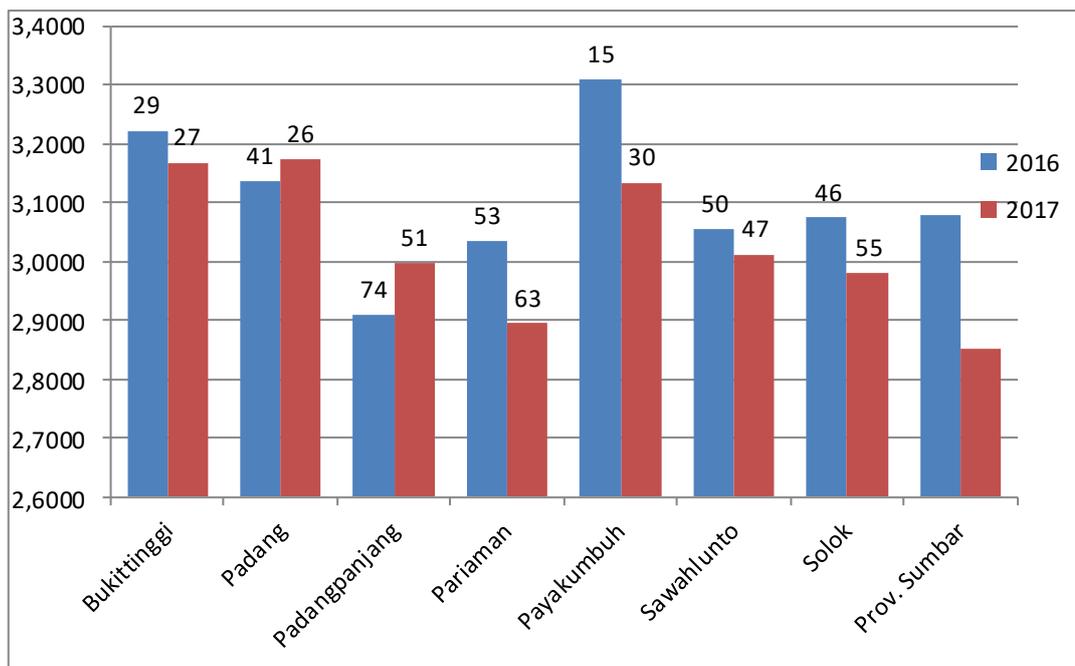
Bagian Pemerintahan Setda sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam penyelesaian penyusunan LPPD juga intens dalam melakukan komunikasi dengan berbagai SKPD terkait sehingga LPPD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Meningkatnya peringkat LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi ini tidak terlepas dari dukungan program yang ada, yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penyusunan LPPD.

3.7. Perbandingan Pencapaian Indikator Peringkat LPPD dengan Kota Se-Sumatera Barat

Grafik Perbandingan Nilai dan Peringkat LPPD antar Kota di Sumatera Barat



Perolehan skor LPPD tahun 2016 sebesar 3,2205 berhasil mengungkit posisi peringkat LPPD Kota Bukittinggi di urutan 29 dari 93 Kota se Indonesia. Jika dibandingkan dengan peringkat antar kota di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi berada pada urutan kedua setelah Kota Payakumbuh yang berada di urutan 15 secara Nasional dengan skor LPPD 3,3077.

Capaian skor LPPD tahun 2017 untuk Kota Bukittinggi mengalami penurunan menjadi 3,1668, namun untuk peringkat Nasional Kota Bukittinggi naik 2 peringkat ke urutan 27 Nasional. Sementara jika dibandingkan dengan peringkat



antar Kota di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi masih berada di urutan kedua setelah Kota Padang dengan skor 3.1723 pada urutan 26 Nasional.

Jika dibandingkan lebih lanjut dengan skor LPPD yang diraih oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016 maupun tahun 2017, skor LPPD Kota Bukittinggi masih berada diatas skor Pemerintah Propinsi. Di Tahun 2017, Propinsi Sumatera Barat meraih skor 3,0781 sementara Kota Bukittinggi meraih skor 3,2205. Sementara untuk tahun 2017 Propinsi Sumatera Barat meraih skor 2,8511 jauh lebih rendah dibandingkan dengan skor 3,1668 yang diraih oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

4. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah

4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

<i>Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah</i>	=	<i>Hasil Evaluasi / Opini BPK RI pada tahun 2019 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018</i> W T P
---	---	--

Sumber Data: Badan Keuangan

Capaian terhadap opini BPK dari target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat Nomor 54/S-HP/XVIII.PDG/05/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, disampaikan sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Sistem Pengendalian Internal masih terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Penilaian LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah WTP, dan ini merupakan penilaian WTP yang keenam kalinya berturut-turut bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.



4.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 4.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Opini BPK		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	WTP	WTP	100 %
2017	WTP	WTP	100 %
2018	WTP	WTP	100 %
2019	WTP	WTP	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi telah sesuai dengan target perjanjian kinerja pada masing-masing tahun berjalan. Semenjak awal RPJMD tahun 2016 telah diperoleh Opini BPK sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dengan capaian WTP sejak awal RPJMD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi selalu konsisten dari tahun ke tahun dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga dapat menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan dan sesuai tren dengan kemajuan dalam pengelolaan keuangan diperkirakan Kota Bukittinggi akan kembali memperoleh WTP.

4.3. Perbandingan Realisasi Capaian Target Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

Tabel 4.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Opini BPK Dari Awal RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Opini BPK Tahun 2019 dengan target WTP telah terealisasi WTP dan untuk akhir masa RPJMD ditargetkan Opini BPK WTP.

4.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum Pemerintah Kota Bukittinggi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJMD Kota Bukittinggi. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2019 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 telah dapat dicapai.

Laporan Keuangan Tahun 2018 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya yang dilakukan dalam efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKPD ini agar mencapai target yang ditetapkan diantaranya:

- Mengidentifikasi permasalahan dengan mengumpulkan berbagai temuan pada pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan melihat trend pemeriksaan melalui gelar pengawasan oleh Inspektorat;
- Menindaklanjuti temuan BPK yang berpotensi mempengaruhi kewajaran laporan keuangan;
- Mencegah temuan berulang dan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan dan asset SKPD dan PPKD;
- Memonitoring setiap progres penyusunan laporan keuangan dari entitas akuntansi SKPD sampai laporan konsolidasi pada entitas pelaporan PPKD; dan
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

Disamping itu dukungan sistem dan prosedur yang telah dibuat dan diterapkan secara konsisten dengan sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten di SKPD pengelola keuangan dan seluruh SKPD yang ada juga ikut membantu dalam pencapaian target ini.



Hal penting lain yang mendukung pencapaian WTP ini adalah pengawasan dan monitoring secara berkala dan konsisten, serta pembinaan secara rutin kepada seluruh SKPD. Keberhasilan Kota Bukittinggi juga didukung dengan evaluasi dan audit dari inspektorat secara rutin dan berkala, serta pembinaan melalui klinik pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih intensif.

Untuk melakukan tugas-tugas ini, aparatur pengelola keuangan dan pengawasan difasilitasi dalam bentuk bimtek/coaching serta pelatihan, baik dengan mengutus peserta, ataupun dilakukan dalam bentuk pelatihan kantor sendiri. Dengan demikian, kemampuan pengelolaan keuangan oleh SKPD semakin meningkat, kemampuan dan keahlian aparatur pengawas juga demikian, sehingga temuan pemeriksaan yang berulang semakin menurun.

Dalam pengelolaan aset juga terjadi peningkatan penyelesaian masalah aset dan ketepatan pengelolaannya, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi. Dengan aplikasi ini, terjadi kecepatan pengelolaan keuangan, sekaligus akurasi dan ketepatan dalam penyajiannya.

4.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program kegiatan pendukung untuk menunjang indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- Program peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah
- Program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah
- Program pengelolaan pengembangan pengelolaan aset daerah

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi:
 - a. Pelayanan realisasi pencairan dana bantuan sosial
 - b. Pelayanan realisasi pencairan dana hibah
 - c. Pelayanan SP2D non gaji
 - d. Pelayanan SP2D gaji
 - e. Pelayanan SPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
 - f. Pelayanan penyusunan anggaran
 - g. Pelayanan asistensi Rencana Kerja Anggaran
2. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi:



- a. Pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- b. Pelayanan pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pelayanan pendaftaran pajak reklame
- d. Pelayanan pendaftaran PBB-P2 baru, pecah, gabung, salinan dan mutasi
- e. Pelayanan perforasi bill, tiket, karcis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
- f. Pelayanan pembayaran pajak hotel tahun berjalan
- g. Pelayanan pembayaran pajak restoran tahun berjalan
- h. Pelayanan pembayaran pajak hiburan tahun berjalan
- i. Pelayanan pembayaran pajak reklame tahun berjalan
- j. Pelayanan pembayaran pajak BPHTB tahun berjalan
- k. Pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 tahun berjalan
- l. Pelayanan pembayaran piutang pajak daerah
- m. Pelayanan pembayaran pajak daerah dan piutang pajak daerah (selain PBB) berdasarkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
- n. Pelayanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
- o. Pelayanan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

<p><i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik</i></p>	<p>=</p>	<p><i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</i></p>
		<p><i>85.03</i></p>

Sumber Data: Bagian Organisasi

Capaian target indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja IKM Terhadap Layanan Publik Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	75	85,03	113,37%



	<i>Layanan Publik</i>		
--	-----------------------	--	--

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap lembaga penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2019 kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan hasil survei pada lembaga pelayanan publik dimaksud memiliki **nilai “baik” (B) dengan indeks nilai 85,03%**. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi :

1. Persyaratan dengan nilai 3.320
2. Prosedur dengan nilai 3.332
3. Waktu Pelayanan dengan nilai 3.230
4. Biaya/ Tarif dengan nilai 3.696
5. Produk Layanan dengan nilai 3.289
6. Kompetensi Pelaksanaan dengan nilai 3.385
7. Perilaku Pelaksanaan dengan nilai 3.399
8. Sarana dan Prasarana dengan nilai 3.338
9. Penanganan Pengaduan dengan nilai 3.653

5.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKM Terhadap Layanan Publik Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	70	80.45	100 %
2018	75	87.35	116.46 %
2019	75	85.03	113.37 %



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat telah berhasil melebihi angka target di setiap tahunnya. Namun dari capaian, untuk tahun 2019 terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun 2018.

5.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 5.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKM Terhadap Layanan Publik Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	30	85,03	80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sejak awal RPJMD sampai tahun 2019 tetap melampaui target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya dalam meningkatkan layanan pada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang terlayani dengan baik.

5.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat disetiap kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dapat dirasakan dari unit pelayanan publik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan haknya. Disamping itu indeks kepuasan masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi maka secara langsung maupun tak langsung turut mendorong SKPD pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanannya.

5.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya yang mendukung dari indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dimaksimalkan dari sumber daya manusianya, dimana telah dilakukan bimbingan kepada SKPD layanan publik serta telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan layanan publik. Dalam rangka efisiensi pembiayaan, untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat saat ini hanya dilakukan oleh



Pemerintah sendiri dan belum melibatkan lembaga survey independen dengan dengan tidak mengesampingkan kualitas. Survey dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diatur pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

5.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program penunjang pencapaian indikator IKM ini adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan berupa Survey Kepuasan Masyarakat dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan SKPD pelayanan publik lebih termotivasi dalam menciptakan inovasi-inovasi sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

6.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \\ \text{Keuangan Daerah} &= \frac{\text{Rp 111.896.596.611,05}}{\text{Rp 734.106.696.896,05}} = 0,1524 \end{aligned}$$

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi 2019

Tabel 6.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1336	0,1524	114,07%

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan



pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi untuk tahun 2019 sebesar 0,1524. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

6.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 6.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	0,1240	0,1101	91,45%
2017	0,1272	0,1567	123,19%
2018	0,1304	0,1465	112,35%
2019	0,1336	0,1524	114,07%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari upaya aktif Pemerintah Daerah dalam pembenahan-pembenahan objek pajak dan retribusi sehingga bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar. Disamping itu Pemerintah Kota Bukittinggi semakin meningkatkan pengawasan terhadap objek-objek pajak dan retribusi sehingga kebocoran dapat ditekan dan dikurangi. Tidak dapat dipungkiri, meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

6.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Berikut perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan target akhir RPJMD Kota Bukittinggi:

Tabel 6.3.1. Perbandingan antara Capaian Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1240	0,1524	0,140



Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kegiatan tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan. Pada penetapan target kemandirian keuangan daerah tahun 2016 (tahun awal RPJMD) sebesar 0,124, potensi pajak dan retribusi belum tergali secara keseluruhan. Namun seiring waktu, objek tersebut terus digali dan dibenahi hingga dapat mendongkrak penerimaan PAD Kota Bukittinggi.

6.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam upaya pencapaian indikator, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah dilakukan dengan mengikuti studi pembelajaran ke daerah lain, peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis (pendataan, penagihan dan pertimbangan keberatan) serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan (updating data pajak dan wajib pajak), serta optimalisasi penggunaan aplikasi pengawasan pajak melalui *cash register online*. Hal lain yang tidak kalah penting dan berperan dalam peningkatan PAD adalah upaya pemerintah dalam menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber PAD baru di Kota Bukittinggi.

6.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola PAD sehingga pencapaian indikator kinerja menjadi lebih optimal. Disamping itu adanya sanksi penenaan denda pajak dan retribusi juga ikut meningkatkan PAD karena hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, serta pengawasan pajak dan retribusi daerah melalui penggunaan *cash register* yang terintegrasi.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan meningkatkan pengawasan dan menggunakan teknologi informasi dalam penyederhanaan dan mempermudah pelayanan dalam penerimaan pajak dan retribusi.

6.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program penunjang pencapaian indikator ini diantaranya yaitu Program Peningkatan Penerimaan PAD dengan kegiatannya Pengawasan pajak dan retribusi



Pemerintah Kota Bukittinggi

daerah, Pengelolaan administrasi pajak daerah, Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD), Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2, manajemen pengelolaan PBB BPHTB, dan pemutakhiran data piutang Pajak.

**MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN
MISI III : SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN
LINGKUNGAN**

Untuk mewujudkan misi 3 ini, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	3.1.1	Terpenuhinya RTH Kota
		3.1.2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan
		3.1.3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)
3.2	Peningkatan Penataan Ruang Kota	3.2.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota

Untuk menggambarkan capaian terhadap misi 3 ini akan disajikan analisis masing-masing tujuan dan sasaran strategis berdasarkan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

**TUJUAN 3.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Tujuan pertama dari misi 3 ini diukur berdasarkan indikator utama dari sasaran strategis berikut :



**SASARAN STRATEGIS 3.1.1
Terpenuhinya RTH Kota**



Capaian sasaran strategis 3.1.1 ini diukur berdasarkan capaian 1 (satu) indikator kinerja utama, seperti pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase RTH Publik	17%	8,4%	49,41%

7. Persentase RTH Publik

7.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase RTH Publik} &= \frac{\text{Luas RTH Publik}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \\
 &= \frac{212,163 \text{ Ha}}{2523,9 \text{ Ha}} = 8,4\%
 \end{aligned}$$

Sumber Data: Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 7.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase RTH Publik Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase RTH Publik	17%	8,4%	49,41%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk persentase RTH Publik hanya 49,41%, masih sangat jauh dibawah target tahun 2019 sebesar 17%. Jika mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 (dua puluh) persen Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 (sepuluh) persen Ruang Terbuka Hijau Privat. Pada Tabel diatas terlihat luas RTH yang ada pada tahun 2019 adalah 212,163 Ha (8,4%) dari luas RTH indikator yang seharusnya tersedia yaitu sebesar 506 Ha (20%). Sehingga untuk persyaratan luas minimal 20 (dua puluh) persen RTH Publik dari luas wilayah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang belum tercapai.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi dua, yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain



berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

2. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

7.2. Perbandingan Realisasi Capaian Target Tiga Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase RTH Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.2.1 Perbandingan Realisasi Persentase RTH Publik Capaian Target Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Persentase RTH Publik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	8%	-	-
2017	10%	8,40 %	84%
2018	14%	8,41 %	60,07%
2019	17%	8,41 %	49,47%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Bukittinggi tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan capaian kinerja untuk indikator ini.

7.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 7.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase RTH Publik Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase RTH Publik	8%	17%	8,4%	17%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi indikator kinerja untuk persentase RTH Publik masih jauh berada dibawah kondisi akhir RPJMD.

7.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2019, *Persentase RTH Publik* tidak mengalami peningkatan atau penambahan luas sehingga capaian kinerja untuk Tahun 2019 menjadi menurun



akibat angka target Tahun 2019 lebih besar dari Tahun 2018 yakni dari 14% di Tahun 2018 menjadi 17% untuk Tahun 2019. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk program pengelolaan RTH yaitu pemeliharaan peningkatan Ruang Terbuka Hijau seperti kegiatan pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota dan Pengelolaan Pembibitan Taman Kota bukan untuk penambahan luas RTH.

Persentase RTH dengan realisasi 49,47% dikategorikan kurang baik dapat didefinisikan gagal. Penyebab kegagalan tidak tercapainya target capaian persentase RTH Publik dikarenakan kawasan yang seharusnya menjadi RTH dalam kondisi terbangun sehingga hal ini menjadi kendala dalam penambahan luas kawasan RTH. Disamping itu, lahan untuk pembangunan dan penambahan luas RTH yang sulit disediakan di Kota Bukittinggi.

Penyebab lain yang membuat tidak tercapainya target adalah karena sebagian lahan yang berpotensi untuk diplot sebagai RTH adalah tanah kaum sehingga dibutuhkan pembahasan/negosiasi yang panjang dengan tokoh masyarakat untuk menyepakati suatu area untuk dijadikan RTH publik. Harga tanah yang tinggi di kota Bukittinggi juga merupakan faktor pendorong kegagalan pencapaian target pemenuhan RTH publik karena keterbatasan APBD untuk pembelian tanah dimaksud.

7.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target indikator, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi target kota diantaranya setiap kelurahan harus mempunyai taman-taman kelurahan yang nantinya akan dijadikan sebagai taman RTH Publik di Kelurahan. Untuk sempadan ngarai yang tidak boleh menjadi kawasan terbangun dapat dijadikan RTH Publik. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Kota dengan pemilik tanah (masyarakat) agar bersedia menjadikan lahan milik mereka menjadi RTH Publik. Selain itu, untuk jalan-jalan utama disediakan median jalan yang dijadikan taman kota.

Untuk memaksimalkan fungsi taman sebagai penghasil oksigen dan estetika kota perlu dilakukan revitalisasi terhadap taman-taman yang telah ada mulai dari rehab rekonstruksi sampai dengan peremajaan tanaman yang ada di taman kota saat ini.

7.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Pada tahun 2019 dilakukan perencanaan kawasan RTH Ngarai Maaram, direncanakan perluasan taman dengan memanfaatkan eks Kantor Lurah kayu



Kubu, Kantor KONI dan PMI, penyediaan lokasi untuk taman-taman RTH baru, perencanaan penambahan taman-taman vertikal di taman-taman kota dan penambahan taman-taman vertikal di taman-taman kota.

8. Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan

8.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\frac{\text{Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan}}{\text{Jumlah Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan}} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan per Fasum}}{\text{Jumlah Fasum}} = 88,12\%$$

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 8.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan	75%	88,12%	117,49%

Fasilitas umum merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum, masyarakat tidak dikenai bayaran. Fasilitas umum terdiri dari jalan raya, tempat sampah, trotoar, ruang terbuka hijau, taman kota, lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas, papan penunjuk jalan, pelayanan pemadam kebakaran, jembatan dan lainnya.

Pada tahun 2019 ini, realisasi indikator untuk Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan adalah sebesar 88,12%. Hal ini telah melebihi target 2019 yaitu sebesar 75%, dengan capaian sebesar 117,49%.

Berikut rincian fasilitas publik di Kota Bukittinggi dan upaya peningkatan yang dilakukan selama tahun 2019:

- a. Jalan $(157,4/180,17) \times 100\% = 87,8 \%$
- b. Jembatan $(29/32) \times 100\% = 90,62 \%$
- c. Trotoar $(66/86) \times 100\% = 77\%$
- d. Saluran Air $(60.088\text{m}^2/61.568\text{m}^2) \times 100\% = 97,5\%$

8.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi capaian indikator Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan di Kota Bukittinggi dibandingkan dengan realisasi capaian target tiga tahun terakhir sebagai berikut :



Tabel 8.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	55%	-	-
2017	60%	-	-
2018	65%	67,94 %	106,58 %
2019	75%	88,12 %	117,49%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan dengan membandingkan capaian kinerja antara tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan angka capaian kinerja dari 106,58% menjadi 117,49%. Realisasi tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, terutama dengan peningkatan 1 buah jembatan, panjang trotoar dari 10 km menjadi 66 km, dan luas saluran air dari 3652 m2 menjadi 60.088 m2.

8.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 8.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan	55%	75 %	88,12 %	85 %

Mengacu pada kondisi awal RPJMD dengan Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan 55%, hingga tahun 2019 telah mampu dilampaui dengan realisasi mencapai 88,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan terus bertambah seiring dengan giatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

8.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya maksimalkan seluruh potensi sesuai dengan rencana kerja Tahun 2019. Namun kendala yang dihadapi dalam upaya



peningkatan Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan di Kota Bukittinggi saat ini terkait dengan pembebasan lahan/tanah dimana Pemerintah harus berhadapan dan bernegosiasi dengan pemilik. Perdebatan akan luas tanah antara fisik dengan pencatatan aset masih terjadi, sehingga mengakibatkan terkendalanya proses penerbitan sertifikat dan lain-lainnya. Konflik internal antara pemilik tanah/bangunan terhadap pengembalian tanah By Pass menjadi perhatian serius yang terus diupayakan untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Penyebab keberhasilan lain adalah adanya pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak dari awal perencanaan dengan memperhatikan keberadaan dan pelestarian lingkungan.

8.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui SKPD pengampu melakukan beberapa hal terkait kepastian ketersediaan lahan yang telah sesuai dengan peruntukan ruang yang dituju, pemantapan proses pengadaan barang dan jasa serta mematangkan perencanaan penganggaran kegiatan, sehingga pada saat implementasi pembangunan tidak ada lagi kendala dalam proses pembangunan tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu dilakukannya percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dimana diharapkan pada triwulan I seluruh kegiatan telah masuk pada tahapan pelelangan serta diupayakan peningkatan kuantitas aparatur bersertifikasi sehingga penanganan kegiatan fisik dapat terdistribusi secara baik dan proposional. Diharapkan dengan terpenuhinya hal tersebut diatas, capaian kinerja kedepan akan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

8.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan penunjang untuk pencapaian indikator diantaranya:

1. Jalan, dengan kegiatan pendukung sebagai berikut :
 - Peningkatan Jalan Dalam Kota
 - Pembangunan Jalan Dalam Kota (Rp 4.200.000.000,-)
 - Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota (Rp 400.000.000,-)
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (Rp 400.000.000,-)
 - Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tahun 2019



- Perencanaan DAK Jalan 2019 (Rp 100.000.000,-)
- 2. Jembatan, dengan kegiatan pendukung sebagai berikut:
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan (Rp 75.000.000,-)
- 3. Trotoar, dengan kegiatan pendukung sebagai berikut:
 - Peningkatan Trotoar
 - Pembangunan Trotoar
 - Peningkatan Trotoar Tahun 2019
 - Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota (Rp 225.000.000,-)
- 4. Saluran Air, dengan kegiatan pendukung sebagai berikut:
 - Perencanaan Pembuatan Drainase dan Pemasangan Paving Block Serta Trotoar
 - Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong (Rp 909.713.900,-)
 - Peningkatan Drainase (Rp 1.247.723.425,-)
 - Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali
 - Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir



SASARAN STRATEGIS 3.1.3
Pemenuhan Target Universal Access (Sanitasi, Air Bersih, Dan Pemukiman Kumuh)

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.1.3 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyediaan air minum layak	95%	88,68%	93,34%
2.	Kawasan Kumuh	0 Ha	0 Ha	100%
3.	Persentase Sanitasi Layak	100%	96,38%	96,38%



9. Cakupan Akses Air Minum Layak

9.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan Akses Air Minum Layak} &= \frac{\text{Jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum layak}}{\text{Jumlah penduduk keseluruhan}} \times 100\% \\
 &= \frac{114.211}{128.783} \times 100\% = 88,68\%
 \end{aligned}$$

Sumber Data: Dinas Kesehatan

Tabel 9.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Cakupan Akses Air Minum Layak Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Akses Air Minum Layak	95%	88,68%	93,34%

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Cakupan akses air minum layak Kota Bukittinggi belum 100%. Tahun 2019, upaya pemerintah Kota Bukittinggi untuk memenuhi cakupan akses air minum layak bagi masyarakat bukittinggi baru terealisasi 88.68% atau 114.211 jiwa dari 128.783 jiwa. Masih terdapat sekitar 14.572 jiwa yang belum mendapatkan cakupan akses air minum layak di Kota Bukittinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperluas cakupan akses air minum layak, salahsatunya dengan mengusulkan Pembangunan Embung yang berlokasi di Tabek Gadang. Embung ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kebutuhan akan air di Kota Bukittinggi. Pembangunan embung ini dibiayai oleh APBN dan APBD Kota Bukittinggi, dimana untuk tahap awal ini PDAM Kota Bukittinggi dapat memanfaatkan air 40 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan 3.800 Rumah Tangga baru.



9.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 9.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Minum Layak 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Cakupan Akses Air Minum Layak		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	85	85	100%
2017	85	86,40	101,65%
2018	90	87,31	97,01%
2019	95	88,68	93,35%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Cakupan Akses Air Minum Layak Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dan 2017 telah mampu mencapai target dan bahkan melebihi target, namun sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan sehingga belum mampu menyentuh angka target yang ditetapkan.

9.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator Persentase Cakupan Akses Air Minum Layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 9.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Minum Layak Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Cakupan Akses Air Minum Layak	85%	88,68%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase cakupan air minum layak Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi 88,68%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100% masih belum dicapai. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan penyediaan air minum layak dengan dinataranya dengan diujicobakannya Embung Tabek Gadang sejak tahun 2019 yang secara langsung telah dapat menopang pemenuhan akses air minum layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi, melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kualitas air serta dengan meningkatkan distribusi air minum layak ke rumah-rumah warga masyarakat.



9.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam upaya penyediaan akses air minum layak, Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa melakukan berbagai usaha untuk menjamin ketersediaan air minum layak bagi penduduknya, salah satunya penyediaan lahan untuk pembangunan embung air di Tabek Gadang. Disamping itu, petugas kesehatan juga senantiasa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya air minum yang memenuhi standar kesehatan serta selalu melakukan pengawasan terhadap sarana air minum dilakukan secara berkala.

Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menambah debit air minum di Kota Bukittinggi adalah mencari sumber air baku melalui kerjasama dengan Kabupaten Agam yaitu melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional Bukittinggi-Agam dimana saat ini masih dalam tahap pembebasan Finalisasi MoU di Kementerian PUPR dan melalui upaya memaksimalkan potensi sumber air yang ada di Kota Bukittinggi sendiri yaitu rencana pembangunan SPAM Panorama Baru. Upaya lain adalah mengurangi tingkat kebocoran air yaitu dengan penggantian pipa distribusi PDAM yang sudah tua (pipa zaman Belanda) yang dilakukan secara bertahap dengan pendanaan APBN dan APBD Kota Bukittinggi.

Untuk pembangunan Embung Tabek Gadang ini, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghabiskan dana sebesar 10 (sepuluh) Milyar untuk pembebasan lahan dan anggaran PDAM Tirta Jam Gadang sebesar 3 (tiga) Milyar untuk pembebasan lahan sebagai jalan menuju Embung.

9.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi pencapaian indikator, sumber daya utama yang dilibatkan adalah sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yaitu sanitarian puskesmas serta kader kesehatan yang selalu melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap air minum layak yang beredar di masyarakat. Didukung dengan sumber daya anggaran yang tersedia dalam pengawasan sarana prasarana cukup memadai untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum.

9.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Upaya yang dilakukan untuk penyediaan air bersih adalah dengan program:

- 1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat



Program Pengembangan Lingkungan Sehat terkait dengan penyediaan air bersih adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan air bersih dimasyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan air minum pada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan.

2) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan ini secara khusus bertujuan untuk pengawasan sanitasi depot air minum. Seluruh Pemilik depot air Minum isi ulang yang ada di Bukittinggi selalu diberikan penyuluhan dan pelatihan. Air digunakan selalu diperiksa setiap bulannya.

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan sampel air minum dirumah tangga untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, verifikasi kepemilikan sarana air minum. Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga termasuk penyediaan air bersih. Program kegiatan yang menunjang akses air minum layak terdapat pada program upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

10. Luas Kawasan Kumuh

10.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

<i>Luas Kawasan Kumuh</i>	= <i>Luas kawasan kumuh yang ditetapkan melalui keputusan Walikota berdasarkan kriteria teknis tertentu</i>
	= <i>0 Ha</i>

Sumber Data: Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 10.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Luas Kawasan Kumuh	0 Ha	0 Ha	100%

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan,



kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Luas permukiman kumuh pada tahun 2014-2017 di Kota Bukittinggi adalah seluas 30,6 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) lokasi kawasan kumuh kota kategori kumuh berat dengan luas total 30,6 Ha, yaitu Kawasan Aur Tanjungkang Tengah Sawah dengan luas kawasan lebih kurang 8,48 Ha dan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang. Dari luas tersebut, luas permukiman kumuh yang tertangani adalah 8,81 Ha pada tahun 2017, sehingga persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2017 adalah sekitar 28,79 %. Persentase ini terus diupayakan berkurang dengan adanya kelanjutan program KOTAKU pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 ini persentase luasan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi berkurang menjadi 0%. Artinya dengan ditetapkannya 2 (dua) Kawasan Kumuh sebagaimana diatas, telah dituntaskan 2 (dua) kawasan tersebut tidak menjadi Kawasan Kumuh lagi pada tahun 2019. Diharapkan penuntasan Kawasan Kumuh ini berlangsung secara menyeluruh hingga tidak ada lagi Kawasan Kumuh di Kota Bukittinggi.

10.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi Capaian Kinerja kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Luas Kawasan Kumuh		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	-	-	-
2017	16 ha	21,79 ha	63,81%
2018	6 ha	4 ha	133,33%
2019	0 ha	0 ha	100%

Pada tabel diatas terlihat luas pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2017 yakni sebesar 8,81Ha dengan persentase 28,79 % dan pada tahun 2018 persentase penanganan kawasan kumuh meningkat menjadi 89,44% dengan luasan yang ditangani sebesar 27,37 Ha. Dari tabel diatas juga dapat dilihat persentase luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21,79 Ha atau sebesar 0,9 %. Pada tahun 2018 luas kawasan kumuh



berkurang menjadi 0,15% atau 4 Ha. Dan pada tahun 2019 menjadi 0%. Hal ini merupakan gambaran berhasilnya program terhadap pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan, baik kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Namun yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah bagaimana upaya intervensi dan antisipasi agar tidak semakin meluasnya Kawasan Kumuh tumbuh di Kota Bukittinggi. Hal ini perlu dioptimalkan mengingat posisi Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan dan kota tujuan bagi masyarakat sehingga arus migrasi ke Kota Bukittinggi akan besar dan tentu saja ini akan berkontribusi dalam meningkatkan Kawasan Kumuh di Kota Bukittinggi.

10.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator Luas Kawasan Kumuh dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 10.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Luas Kawasan Kumuh	30,60 Ha	0 Ha	0 Ha

Data pada tabel menunjukkan bahwa di Tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil mencapai target akhir RPJMD. Upaya keras Pemerintah Kota dalam menekan luas kawasan kumuh hingga ke titik 0 Ha telah berhasil dilakukan dalam 3 tahun anggaran. Hingga nanti diakhir tahun RPJMD Pemerintah Kota akan terus berupaya agar 0 Ha luas kawasan kumuh ini dapat dipertahankan dengan tetap melakukan berbagai program dan kegiatan yang mampu meminimalisir munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kota Bukittinggi.

10.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai salah satu dari 11 kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang menjadi prioritas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan sinergi dari penugasan khusus Kementerian Keuangan kepada SMF yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Pemerintah kota Bukittinggi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta



Karya Kementerian PUPR, dan Direktur SMF. Selanjutnya, Kementerian PUPR menunjuk Kota Bukittinggi sebagai penerima hibah senilai Rp1 miliar untuk membenahi 12 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi 45 jiwa di 2 Kelurahan di yakni Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah (AATS) dan Kelurahan Pakan Kurai.

10.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kerjasama berbagai pihak dalam menuntaskan luas kawasan kumuh di Kota Bukittinggi turut menjadi komitmen bersama dalam mendukung suksesnya Program Pemerintah. Para pemangku kepentingan lintas sektor telah berhasil guna mewujudkannya. Rumah-rumah di pemukiman kumuh dirubah untuk ditingkatkan kualitas huniannya, lebih produktif dan berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap perumahan dan pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.

Hal ini telah menunjukkan pentingnya membangun upaya terpadu untuk penanganan permukiman kumuh bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

10.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Kegiatan penunjang pencapaian indikator ini diantaranya Kegiatan Bedah Rumah, Pendamping Kegiatan P2KP/ KOTAKU, dan Pendamping Kegiatan BSPS yang berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disamping itu, menggantikan kawasan kumuh dengan rumah layak huni telah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pembangunan rumah layak huni melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sangat berdampak signifikan dengan hasil realisasi perjanjian kinerja luas kawasan kumuh menjadi 0 Ha. Program penunjang lain yang dilakukan yakni melalui dana Bina Lingkungan (BL) SMF yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dimanfaatkan untuk membenahi RTLH Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah disurvei sebelumnya.



11. Persentase Sanitasi Layak

11.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\text{Persentase sanitasi layak} = \frac{\text{Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebanyak}}{\text{Seluruh rumah tangga}} \times 100\% = \frac{124.129}{128.783} \times 100\% = 96,39\%$$

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 11.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Sanitasi Layak Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sanitasi Layak	100%	96,39%	96,39%

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat. Di Indonesia penanganan sanitasi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase lingkungan terutama di kawasan permukiman. Sanitasi dikatakan layak apabila toilet di masing-masing rumah tangga sudah dilengkapi dengan sarana pengolahan air buangan yang memenuhi standar teknis baik untuk skala individual maupun skala komunal atau bersama.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa di Kota Bukittinggi capaian kinerja untuk akses sanitasi layak baru mencapai 96,38%. Hal ini berarti bahwa jika dibandingkan dengan target nasional untuk tahun 2019 yang sudah harus 100%, pencapaian Kota Bukittinggi masih berada dibawah target nasional.

Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program Integrasi Program Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Dan Nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 90% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.



Pencapaian target kinerja ini diupayakan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pembiayaan program juga dibiayai bersama melalui APBD pemerintah provinsi dan program Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu dilakukan pertemuan yang intens melalui pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang ada pada seluruh kelurahan.

Persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 93,12% sementara tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi 72,72% dari 95% yang ditargetkan, dan pada tahun 2017 dengan target 90% terealisasi 90,05% dan pada tahun 2019 ditargetkan 100% dan terealisasi 96,38% dengan realisasi capaian kinerja 96,38%. Kondisi ini merupakan penyesuaian terhadap data pada Strategi Sanitasi Kota dan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.

11.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sanitasi Layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.2.1. Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Sanitasi Layak Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Sanitasi Layak		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	85%	72,72%	100 %
2017	90%	90,05%	100,05 %
2018	95%	95,94%	100 %
2019	100%	96,38%	96,38 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 telah terdapat peningkatan pencapaian sanitasi layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi, dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja, namun bila dilihat terdapat penurunan capaian pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan perkembangan kota yang mengakibatkan sedikit penurunan pada capaian akses sanitasi. Namun hal ini juga disebabkan target tahunan yang memang meningkat pada tahun 2019. Secara umum akses sanitasi pada aplikasi SMART STBM adalah 96,24% dari seluruh Kota Bukittinggi.



11.3. Perbandingan Realisasi Capaian Target Dengan Target RPJMD

Realisasi capaian indikator sanitasi layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 11.3.1 Perbandingan Realisasi
Capaian Target Persentase Sanitasi Layak Dengan Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Sanitasi Layak	85%	100 %	96,38 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi 96,38%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan realisasi 100% ada setidaknya lebih kurang 3,62% atau 4,654 orang yang harus dicapai sampai akhir masa RPJMD dengan target 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah warga sehingga terjadinya peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

11.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun kegiatan pendukung keberhasilan dari indikator ini yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dan Dinas Lingkungan Hidup dengan intensnya melakukan kegiatan sosialisasi terkait permasalahan sanitasi utamanya persoalan sampah dan limbah. Disamping itu Dinas Kesehatan juga selalu gencar dalam mempromosikan gerakan PHBS, mengingat tantangan terbesar dalam pembangunan sanitasi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sehingga diperlukan upaya advokasi, kampanye dan edukasi secara intensif untuk menimbulkan rasa kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik. Disamping itu, pada tahun 2018 juga telah dideklarasikan 2 (dua) Kelurahan sebagai Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, yaitu Kelurahan Belakang Balok dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun. Serta pada tahun 2019 ditambah 1 (satu) Kelurahan lagi yaitu Kelurahan Koto Selayan. Upaya untuk mempromosikan Stop Buang Air Besar Sembarangan juga sangat berkontribusi dalam meningkatkan akses sanitasi layak di Kota Bukittinggi.



Secara umum pencapaian akses sanitasi layak yang cukup tinggi ini, tidak terlepas dari gencarnya pembinaan-pembinaan ke rumah tangga serta kesadaran masyarakat sendiri yang cukup tinggi.

Capaian Sanitasi Layak juga ditentukan oleh keberadaan IPLT, sementara Kota Bukittinggi sampai saat ini belum memiliki IPLT. Sesuai dengan Revisi RTRW Kota Bukittinggi maka telah diplot lokasi pembangunan IPLT dan tahun 2018 telah dilakukan kajian *Feasibility Study* (FS). Disamping indikator ini juga ditentukan oleh pembuangan limbah tinja langsung ke saluran drainase/cubluk atau sungai, hal ini menyebabkan air tanah menjadi tercemar oleh bakteri e-coli dan hal ini juga disebabkan oleh septictank yang tidak septic artinya adanya kebocoran.

11.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peran tenaga kesehatan dalam mempromosikan PHBS di lingkungan rumah tangga ikut membantu pencapaian indikator ini. Namun di sisi lain, terbatasnya sumber pendanaan APBN dan APBD dalam pembangunan sanitasi menyebabkan sulitnya meminimalkan gap menuju akses universal di indikator sanitasi di tahun 2019. Disamping itu, keberadaan kelompok kerja sanitasi sangat berperan aktif dalam mencari solusi terhadap permasalahan sanitasi di kota Bukittinggi.

11.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program yang dilakukan oleh SKPD pengampu adalah dengan melaksanakan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di tahun 2019 dengan memanfaatkan dana Alokasi Khusus dengan serapan dana lebih dari 1,2 M dengan tingkat keberhasilan penyerapan anggaran sebesar 84,34%.

Disamping itu, untuk mewujudkan sanitasi yang layak adalah juga dilakukan melalui program :

1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah upaya untuk pengawasan terhadap lingkungan agar tetap memiliki sanitasi yang layak. Target utama kegiatan ini adalah mewujudkan Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan kepada Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan, diantaranya pemeriksaan sanitasi pasar, rumah sakit, hotel, rumah makan, sekolah, Puskesmas dan tempat umum lainnya.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimaksud adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, salah satunya adalah upaya kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan adalah Inspeksi sanitasi pada seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas, memberikan pelayanan klinik sanitasi, membina kantin sekolah serta upaya promosi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan.

TUJUAN 3.2 : PENINGKATAN PENATAAN RUANG KOTA

Tujuan kedua dari misi 3 ini didukung oleh beberapa sasaran strategis berikut:



SASARAN STRATEGIS 3.2.1 Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota

Indikator Kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	70%	80.13%	114.47%

Dari tabel dia atas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 114.47%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **memuaskan**.



12. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota

12.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota} &= \frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang Kota yang Sesuai Peraturan}}{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang Kota}} \times 100\% \\ &= \frac{255 \text{ KRK Keluar}}{318 \text{ Permohonan KRK}} \times 100\% = 80,13\% \end{aligned}$$

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 12.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	70%%	80,13%	114,47%

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Pengontrolannya dilakukan melalui penerbitan Rekomendasi Peruntukan Lahan, yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Kota Bukittinggi sebelum penerbitan izin mendirikan bangunan. Sementara bangunan yang didirikan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan diawasi melalui razia gabungan yang melibatkan Dinas PUPR, Dinas PMPTSPPTK, Satpol PP dan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan.

Pada tahun 2019, ditargetkan 70% pemanfaatan ruang kota sudah sesuai dengan peruntukan lahan dalam pola ruang kota yang termuat dalam RTRW, dan sesuai dengan realisasi pemanfaatan ruang kota sebanyak 80,19% sudah sesuai dengan peruntukan ruang.

12.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	55%	94,40%	171,63%
2017	60%	78,78%	131,30%



2018	65%	87,16%	134,09%
2019	70%	80,13%	114,47%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi capaian dari tahun 2016 hal ini dikarenakan semakin tingginya target capaian dari tahun ke tahun, dalam upaya kesesuaian pemanfaatan ruang kota di Kota Bukittinggi akan terus ditingkatkan sehingga terwujudnya kesesuaian ruang kota yang representatif.

12.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 12.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota	55%	80,13%	70%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang kota pada awal RPJMD dengan capaian 55% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70%, sampai pada akhir masa RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang kota menjadi 70% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 80,19%.

12.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk bangunan khusus dalam kawasan yang lebih luas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Sekretariatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tim ini melakukan analisa dan menerbitkan peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang daerah. Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dilakukan melalui pengurusan, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Bangunan tanpa izin diharuskan mengurus izin, sementara itu juga dilakukan revisi terhadap RTRW sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimungkinkan sesuai peraturan



perundang-undangan penataan ruang daerah, setelah dilakukan peninjauan kembali dan diproses secara teknis sesuai ketentuan pemerintah.

12.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja indikator ini didukung melalui upaya yang sudah disampaikan sebelumnya seperti pengusuran, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Sejalan dengan revisi RTRW, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bapelitbang dan Dinas PUPR juga melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan.

Untuk meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang dan salahsatu bentuk upaya pencegahan penyalahan guna pemanfaatan ruang yang ada maka dalam setiap rencana pembangunan hal utama yang pertama kali dikaji adalah kesesuaian pola ruang dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan untuk penyebarluasan informasi peruntukan pola ruang pada masyarakat luas maka di beberapa titik utama kota dipasang billboard yang berisi informasi pola ruang kota.

12.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kesesuaian pemanfaatan ruang kota ini antara lain dengan melakukan pembuatan keterangan rancangan kota dengan anggaran Rp. 22.688.384,-

MISI IV : MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA

Untuk mewujudkan misi 4 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
4.2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	4.2.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis misi IV adalah sebagai berikut

TUJUAN 4.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 4.1.1
Meningkatnya Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,40%	5,88%	91,87%
2.	PDRB Perkapita	54,50 juta	66,52 juta	122,06%
3.	Indeks Gini	<0,3	0,267	89%
	Rata-Rata Capaian			100,98%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama untuk misi 4 ini yaitu sebesar 100,98% sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **memuaskan**.

13. Pertumbuhan Ekonomi**13.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu}}{5,88}$

Sumber Data: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2019

Tabel 13.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,40	5,88	91,87%

Pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya menjelaskan bagaimana perkembangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi sudah berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi (5,05%) dan nasional (5,02%). Dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 di RPJMD Kota Bukittinggi sebesar 6,40% telah dicapai yaitu 5,88%.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Hal ini sesuai dengan potensi Kota Bukittinggi sebagai kota wisata pariwisata, perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berbenah dan memenuhi



seluruh infrastruktur pendukung sektor utama kota ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dominansi sektor tersier terhadap struktur ekonomi kota. Meskipun masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi masih berada diatas Propinsi dan Nasional.

13.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 13.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	6,12%	6,23%	101,8%
2017	6,20%	6,39%	103,1%
2018	6,30%	6,45%	102,4%
2019	6,40%	5,88%	91,87%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya, terlihat terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2017 hingga ke tahun 2019 ini.

13.3. Perbandingan Realisasi Capaian Target Dengan Target RPJMD

Tabel 13.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi Dengan Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi	6,12%	6,40%	5,88%	6,50 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi belum mampu melampaui target pada tahun ke-4 RPJMD.



13.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2019 secara nasional capaian pertumbuhan ekonomi nasional turun secara menyeluruh, bahkan penurunan ini terburuk dalam 5 tahun terakhir. Tidak terkecuali terjadi pada Kota Bukittinggi, penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun terakhir adalah dampak dari menurunnya kinerja perekonomian Nasional. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa apabila terjadi penurunan kinerja perekonomian nasional maka hal inipun akan diikuti oleh daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Jika di Indonesia penyebab utamanya adalah karena melemahnya sektor industri pengolahan maka di Kota Bukittinggi lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan pariwisata. Menurunnya kinerja perekonomian juga didorong oleh penurunan investasi swasta ke Kota Bukittinggi dan turunnya industri rumah tangga yang disebabkan oleh turunnya permintaan baik nasional maupun internasional dalam bentuk ekspor.

13.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target telah dilakukan berbagai efisiensi sumber daya yang ada, diantaranya mendorong sektor swasta untuk memberikan support serta barang-barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga mereka bisa meningkatkan produksi. Disamping itu, peningkatan kualitas SDM (tenaga kerja) akan mengurangi biaya produksi sehingga akan terjadi efisiensi dalam penggunaan faktor produksi. Selain itu pemerintah akan terus mendorong dan mempermudah proses perizinan sehingga akan mempermudah masyarakat melakukan usaha mereka.

13.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program penunjang pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi diantaranya: program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan industri kecil dan menengah serta program pengembangan sentra-sentra potensial.

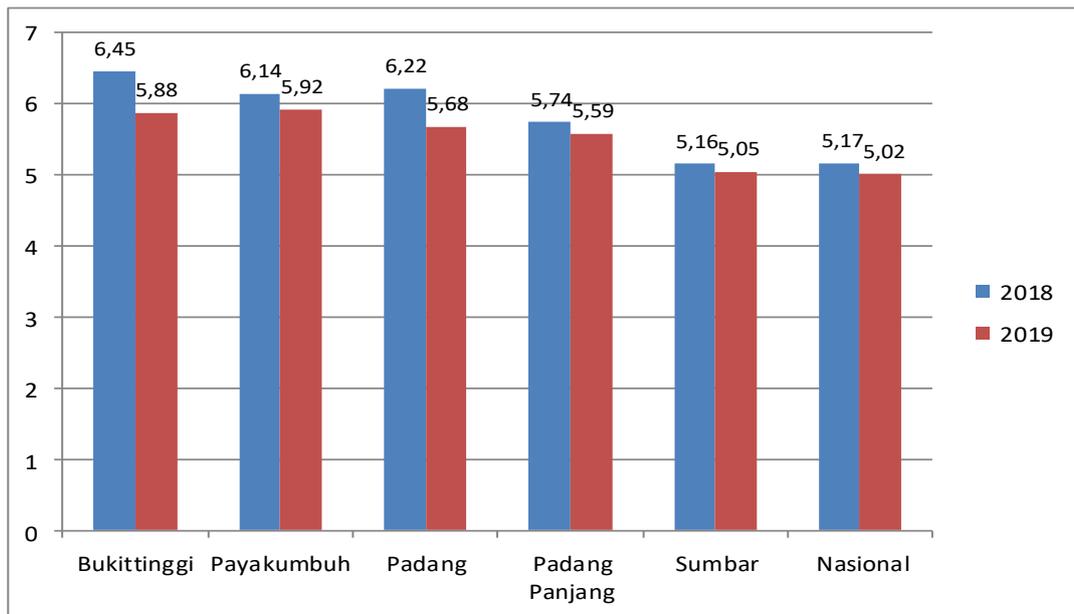


13.7. Perbandingan Pencapaian Indikator dengan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Secara Nasional, Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 5,02 persen dari capaian 2018 yang mencapai 5,17 persen. Hal ini juga diikuti oleh Propinsi Sumatera Barat dimana pada tingkat propinsi pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 5,05 persen lebih rendah dari tahun 2018 yaitu 5,16 persen.

Jika dibandingkan dengan nasional dan propinsi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi masih diatas kedua wilayah tersebut yaitu 5,88 persen. Meskipun terjadi penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 6,45 persen, namun kinerja perkeonomian di Kota Bukittinggi masih tergolong lebih baik.

Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kota Di Sumatera Barat dan Nasional



14. PDRB Perkapita

14.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 \text{PDRB Per Kapita} &= \frac{\text{Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha per Jumlah penduduk pertengahan tahun}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \\
 &= 66,52
 \end{aligned}$$

Sumber Data: Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2019



Tabel 14.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	PDRB Per Kapita	54,50 juta	66,52 juta	122,06%

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebesar Rp 66,52 juta meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah Rp 58,78 juta. Kondisi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi sementara pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan relatif stabil. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu di dalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

14.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	PDRB per Kapita		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	49,88 juta	54,38 juta	109,02%



2017	52,50 juta	58,78 juta	111,96 %
2018	53,25 juta	62,66 juta	117,67 %
2019	54,50 juta	66,52 juta	122,06%

PDRB Perkapita Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2019. Dimana pada tahun 2019 PDRB perkapita Kota Bukittinggi mencapai angka 66,52 juta.

14.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 14.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
PDRB per Kapita	49,88 juta	54,50 juta	66,8 juta	56 juta

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 ini telah dapat melampaui target akhir dari RPJMD sebesar 56 juta.

14.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi adalah mengembangkan sektor-sektor potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan bahkan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi stabil atau malah cenderung berkurang. Hal penting lain yang sangat terkait dengan ini adalah mengendalikan inflasi walaupun realitanya pada tahun 2016 tingkat inflasi terlalu rendah berada pada level dibawah 3% sehingga tidak terlalu mendorong bertumbuhnya ekonomi dari sektor riil.

14.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan



pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan. Kedua indikator ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2014. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

14.6. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Kota-Kota di Sumatera Barat

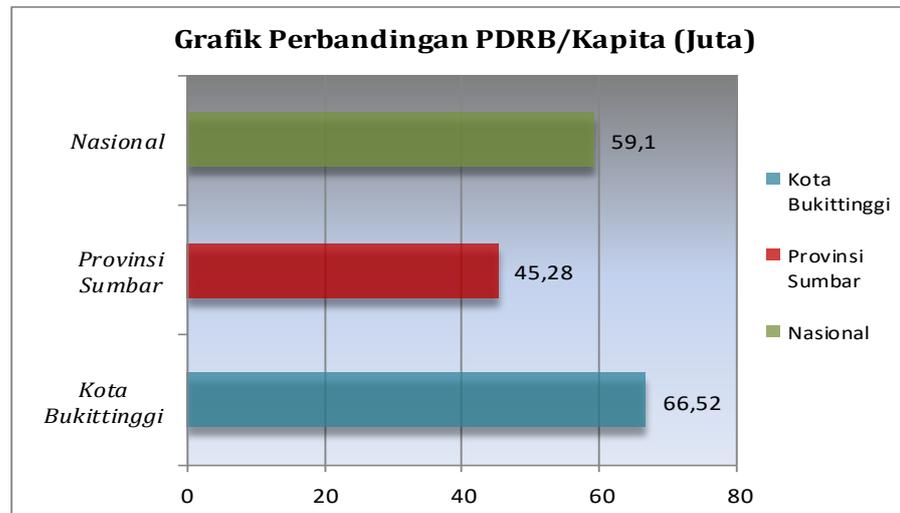
Tabel 14.6.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Kota di Sumatera Barat

Kota	PDRB/GRDP (Juta)	PDRB/Kapita (juta)
Padang	62.457.554	65.68
Solok	4.050.430	57.04
Sawahlunto	3.681.649	58.88
Padang Panjang	3.476.555	64.75
Bukittinggi	8.699.579	66.52
Payakumbuh	6.828.559	50.37
Pariaman	5.008.382	56.59

Data : BPS Sumbar 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan besaran PDRB Perkapita antar kota di Sumatera Barat. Merujuk dari data BPS Sumbar 2020 diatas dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi menjadi kota dengan PDRB perkapita tertinggi di Sumatera Barat dengan angka 66.52 (juta) yang selanjutnya diikuti oleh Kota Padang, Kota Padang Panjang dan seterusnya.

14.7 Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional



Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Per kapita Kota Bukittinggi masih diatas Nasional dan Propinsi dimana Kota Bukittinggi berada pada angka 66,52 (juta) sementara Nasional hanya pada angka 59,1 (juta) dan Propinsi lebih rendah lagi yaitu 45,28 (juta).

15. Indeks Gini

15.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\text{Indeks Gini} = \frac{\text{Distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi}}{0,267}$$

Sumber Data: Data Proyeksi

Tabel 15.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Gini	<0,3	0,267	89%

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain :

1. Ketimpangan Rendah ($G < 0,3$)
2. Ketimpangan Sedang ($0,3 \leq G \leq 0,5$)
3. Ketimpangan Tinggi ($G \geq 0,5$)

Jika Koefisien bernilai 0, berarti ketimpangan sempurna.



Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebesar 0,329, yang menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang memiliki ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka pemerataan penduduk lebih mengarah ke pemerataan sempurna dimana indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,267. Sudah berada dibawah 0,3. Artinya kita sudah berada pada tingkat ketimpangan rendah. Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

Dilihat dari struktur ekonomi kota, dan distribusi masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut, terlihat bahwa sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja belum maksimal, malah sedikit berkontraksi. Hal lain juga terjadi karena sektor riil kurang berkembang, sehingga sebaran penduduk yang berusaha di sektor informal terus meningkat. Hal ini juga mendorong indeks gini sedikit bergeser ke tingkat sedang.

Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah kota untuk mendorong Bergeraknya sektor riil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dominan menjadi usaha masyarakat.

15.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Indeks Gini dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:



Tabel 15.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Gini		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	<0,3	0,3290	90,33%
2017	<0,3	0,3196	93,47%
2018	<0,3	0,3200	93,34%
2019	<0,3	0,2670	89,00%

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Namun terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2019 ini.

15.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 15.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Gini Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Indeks Gini	0,34	<0,3	89%	<0,3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks gini untuk tahun 2019 sebesar 0,267 masih berada sedikit dibawah target RPJMD.

15.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan indeks gini dan dikategorikannya Kota Bukittinggi sebagai kategori “Sedang” dengan indeks yang semakin mendekati 0,3, artinya pemerataan pendapatan di Kota Bukittinggi tidak terlalu timpang sehingga jarak antara penduduk yang berpenghasilan tinggi dan rendah tidak terlalu jauh.

Hal ini disebabkan oleh semakin gencarnya pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan.

Indikator Kinerja Indeks Gini pada Tahun 2019 terjadi penurunan capaian. Penyebab turunnya capaian diakibatkan karena terjadi peningkatan pendapatan

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemiskinan	3,35%	4,60%	62,69%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 62.69%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **cukup**.

16. Tingkat Kemiskinan**16.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

<i>Tingkat Kemiskinan</i>	=	<i>Jumlah penduduk miskin</i>
		4,60 %

Sumber Data: BPS 2019

Tabel 16.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemiskinan	3,35	4,6	62,69 %

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 realisasi kinerja untuk tingkat kemiskinan sebesar 4,6% masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,35%.

16.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 16.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kemiskinan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	4,23	5,48	70,45 %
2017	3,75	5,35	57,34 %
2018	3,50	4,92	59,43 %
2019	3,35	4,60	62,69 %

Sumber: BPS 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi hingga tahun 2019 belum mampu mencapai angka target yang ditetapkan. Namun telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi bergerak turun dari angka 4,92 atau 6.315 jiwa menjadi 4,6 atau 6.000 jiwa.

Data yang dipakai untuk menggambarkan Rumah Tangga Miskin adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut Basis Data Terpadu (BDT) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sementara yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan adalah data makro yang diterbitkan oleh BPS berdasarkan data hasil *sampling*. Oleh karena itu terdapat perbedaan metodologi dalam menentukan persentase penduduk miskin karena yang digunakan adalah data mikro dan dan data makro.

Berdasarkan DTKS Kementerian Sosial tahun 2019, dari 24.746 jiwa dan 5949 KK sebagian besar berada pada desil 3 dan 4 yang artinya adalah warga yang rentan miskin. Untuk upaya penurunan angka kemiskinan perlu dilakukan terobosan salahsatunya dengan melalukan penyusunan indikator kemiskinan daerah sendiri sehingga kita tidak mengkategorikan miskin sesuai dengan 14 (empat belas) indikator yang dipakai oleh BPS. Hal ini dikarenakan, kondisi dan karakteristik kemiskinan masing-masing daerah berbeda. Di kota Bukittinggi, bahkan tidak ditemukan rumah tangga yang hidup di rumah yang berlantai tanah dan berdinding bambu.



16.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator Tingkat Kemiskinan di Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 16.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Tingkat Kemiskinan	4,23	4,6	2,84

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Tingkat Kemiskinan sejak awal RPJMD masih belum dicapai. Namun hingga tahun 2019, angka capaian tiap tahunnya terus bergerak turun dan mengikuti target capaian dengan realisasi melebihi angka 50% ditiap tahunnya. Angka ini didominasi oleh penduduk rentan miskin yang perlu diintervensi dengan program pemberdayaan.

16.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan terus muncul sebagai sebab ataupun akibat dari pemberat berbagai jenis persoalan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Belum tercapainya penurunan angka kemiskinan sesuai target adalah karena intervensi penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran. Disamping itu, semua pihak termasuk SKPD yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan belum bersinergi dengan baik sehingga masih ada program yang tumpang tindih dalam pelaksanaan intervensi.

16.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk berhasilnya sasaran penanganan penduduk miskin perkotaan khususnya dalam hal penurunan penduduk miskin perkotaan, telah dilakukan beberapa



kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran penurunan masyarakat miskin perkotaan. Diantaranya kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan kepada fakir miskin, sehingga fakir miskin yang telah berdaya dapat keluar dari data kemiskinan.

Pada Tahun 2019 juga dilakukan sosialisasi mengenai penumbuhan *Family Care Unit* sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari keluarga pionir. Dari 13 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 10 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kota Bukittinggi. Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS (Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dapat berpartisipasi aktif, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

Saat ini baik pemerintah, swasta dan masyarakat telah bersama-sama berupaya menanggulangi kemiskinan. Dengan dikoordinir dan diwadahi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah diinventarisir berbagai program penanggulangan kemiskinan baik melalui APBN, APBD maupun swasta yang mencapai angka lebih kurang 8 (delapan) milyar rupiah.

16.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Data kemiskinan hasil verifikasi Tahun 2019 terdapat 6.107 KK telah dilakukan verifikasi data. Sebanyak 363 KK dikeluarkan dari data kemiskinan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu pada November 2019. Dari data 363 KK tersebut terdapat ganda dan tidak ditemukan, dianggap telah pindah dan keluar dari Kota Bukittinggi. Capaian masyarakat miskin yang keluar dari data kemiskinan berdasarkan data 2019 adalah sebesar 5.94%. Total Basis Data Terpadu hasil verifikasi dan validasi bulan November setelah dikurangi data yang keluar, sejumlah 5.744 KK.

Program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sudah tersebar pada SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan masyarakat pada Program Sosial Kemasyarakatan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta tidak terlepas dari peran serta aktif pihak swasta.



16.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Kota Di Sumatera Barat

Tabel 16.7.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan Kota Di Sumatera Barat

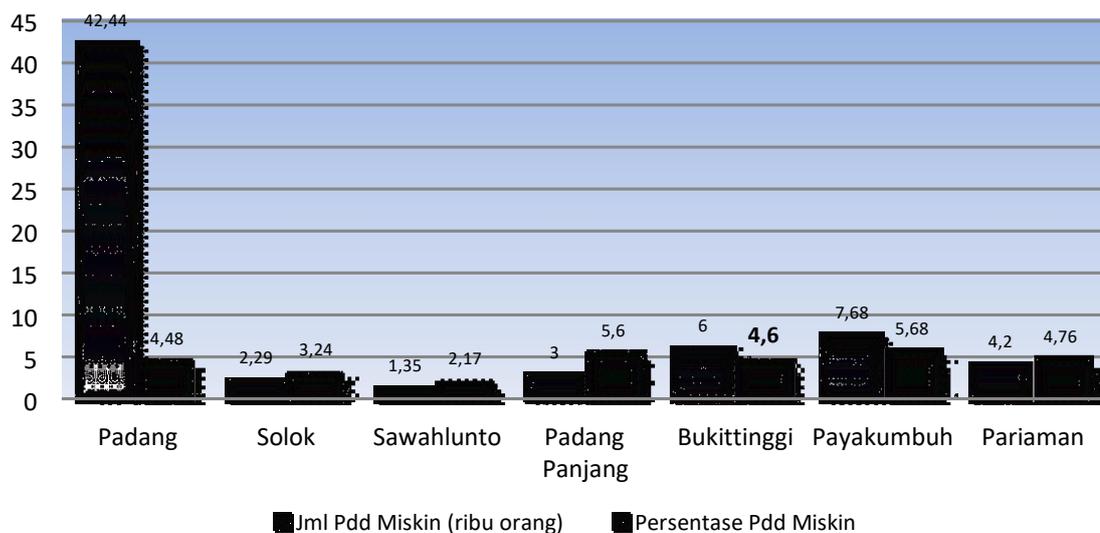
Kota	Jlh Pddk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Padang	42.44	4.48
Solok	2.29	3.24
Sawahlunto	1.35	2.17
Padang Panjang	3.00	5.60
Bukittinggi	6.00	4.60
Payakumbuh	7.68	5.68
Pariaman	4.20	4.76

Data : BPS Sumbar 2020

Persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat masih berada diatas angka 2%. Jika membandingkan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Bukittinggi dengan kota-kota lainnya di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi berada di urutan ke empat tertinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6000 ribu orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4.6%.

Perbandingan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin antar Kota di Sumatera Barat juga dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Antar Kota Di Sumatera Barat





**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN,
MISI V : KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN
SOSIAL MASYARAKAT**

Untuk mewujudkan misi 5 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, tujuan dan sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
5.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	5.1.1	Meningkatkan pelayanan pariwisata
5.2	Layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter unggul	5.2.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
		5.2.2	Meningkatkan kualitas pendidikan
5.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5.3.1	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
		5.3.2	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan
5.4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi	5.4.1	Terkendalnya jumlah penduduk

Analisis capaian kinerjanya dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama per sasaran strategis sebagai berikut:

TUJUAN 5.1 : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN

Pencapaian tujuan pertama pada misi 5 ini akan dicapai berdasarkan capaian indikator kinerja utama beberapa sasaran strategis berikut :



**SASARAN STRATEGIS 5.1.1
MENINGKATKAN PELAYANAN
PARIWISATA**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kunjungan Wisatawan	588.245	584.785	99.41%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 99.41%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

17. Kunjungan Wisatawan

17.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Kunjungan Wisatawan	=	<i>Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara per tahun</i>
	=	584.785 orang

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Tabel 17.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Kunjungan Wisatawan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kunjungan Wisatawan	588.245	584.785	99.41 %

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah



daerah atau dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut.

Berdasarkan data dari tabel diatas, kunjungan wisatawan pada tahun 2019 baik domestik maupun mancanegara pada objek wisata berbayar adalah sebanyak 584.785 orang. Capaian kinerja untuk indikator sedikit berada dibawah daripada target yang ditetapkan pada tahun

17.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Kunjungan wisatwan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Kunjungan Wisatawan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	460.905	538.774	116,89%
2017	511.841	546.895	106,85%
2018	537.309	577.857	107,55%
2019	588.245	584.785	99,41%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2019 terdapat sedikit penurunan. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus berupaya meningkatkan layanan terhadap wisatawan sebagai perwujudan Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata.

Penurunan kunjungan wisatawan ke Bukittinggi tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum selesainya pembangunan Pasar Atas, revitalisasi Jam Gadang, revitalisasi Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, beberapa perbaikan pada objek dan destinasi wisata serta pusat perbelanjaan ini tentunya menyebabkan turunnya kunjungan wisata ke Bukittinggi.

17.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator kunjungan wisatawan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut:



Tabel 17.3.1
Perbandingan antara Capaian
Kinerja Kunjungan Wisatawan Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Kunjungan wisatawan	460.905	588.245	584.785	588.245

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari awal tahun RPJMD dengan jumlah kunjungan 460.905 dan meningkat sampai tahun 2019 dengan jumlah kunjungan 584.245 orang. Pemerintah Kota Bukittinggi terus mendorong kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung serta meningkatkan promosi Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

17.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berbagai upaya terus dilakukan dalam upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Bukittinggi diantaranya:

- Promosi dalam dan luar negeri dengan didukung sarana promosi pariwisata seperti *booklet*, *leaflet*, tas promosi, kalender pemerintah Kota Bukittinggi serta mengoptimalkan media online.
- Meningkatkan *event* kepariwisataan, *event Tour de Singkarak* sejak Tahun 2009, pertunjukan Seni Rupa Tambo, *Tour de Maninjau*, Fotografi, *Coffee Brewing* Bukik Apik, Festival lagu Minang, *Torch Relay Asian Games*, *Paskibraka Competition*, dan *Festival Band Psycho Effect*.
- Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dengan perbaikan sarana dan prasarana diseluruh destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung.
- Semakin meningkatnya *image* pariwisata Kota Bukittinggi, baik di media cetak, elektronik maupun media sosial.

17.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata perlu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap ujung tombak pariwisata seperti, melaksanakan kegiatan Pembinaan Sadar Wisata, Pembinaan Guide dan Pembinaan Jasa Usaha Pariwisata. Pembinaan juga dilakukan terhadap para



pelaku wisata seperti juru parkir, kusir bendi, fotografer, pemandu wisata, sopir angkot serta pedagang souvenir di tempat-tempat wisata, berupa pelatihan dan pengembangan diri agar melakukan pelayanan prima terhadap wisatawan.

17.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun kegiatan pendukung dari indikator kunjungan wisatawan ini antara lain, Pemeliharaan Jam Gadang, Pegelolaan Taman Panorama Lobang Jepang, Pemeliharaan Obyek Wisata, Pemeliharaan TMS-BK, Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Revitalisasi Kawasan Wisata Taman Panorama, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan Luar Negeri, Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata, Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tour de Singkarak, Lomba Fotografi Wisata Tingkat Propinsi dan Cipta Lagu Pariwisata, Fasilitas Iven-iven Pariwisata, Pembinaan *Guide*, Fasilitas Penampilan Tim Kesenian, Pembinaan Sadar Wisata, Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi, Festival Multi Etnis.

17.7. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Kota lain di Sumbar

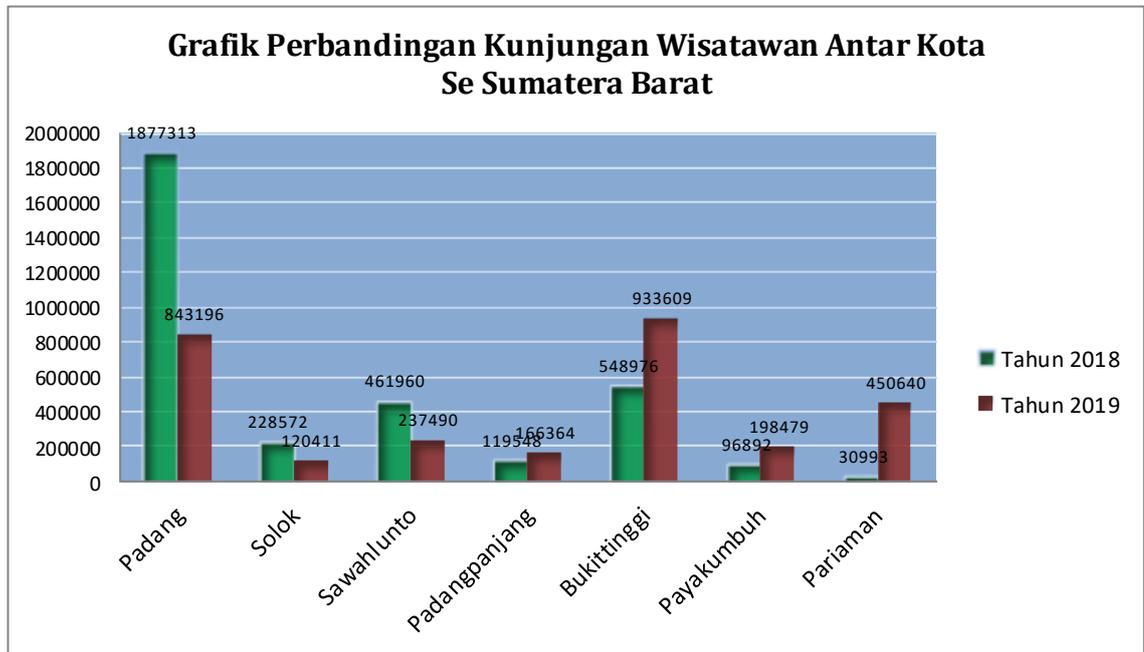
Tabel 17.7.1
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
dengan Kota lain di Sumbar

Kota	Tahun 2018	Tahun 2019
Padang	1.877.313	843.296
Solok	228.572	120.411
Sawahlunto	461.960	237.490
Padang Panjang	119.548	166.364
Bukittinggi	547.976	933.609
Payakumbuh	96.892	198.479
Pariaman	30.993	450.640

Data : BPS Sumbar 2020

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kota Bukittinggi di tahun 2019 menjadi kunjungan wisatawan tertinggi di Sumatera Barat. Kunjungan wisatawan nusantara melalui data BPS Sumbar Tahun 2020 hampir menembus angka 1 juta pengunjung. Tingginya angka kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi, bukan hanya disebabkan oleh faktor alam dan kondisi Kota Bukittinggi yang memang indah dengan berbagai Objek wisatanya. Namun tidak terlepas oleh upaya

Pemerintah dalam melakukan pembenahan di setiap objek wisata beserta sarana dan prasarana pendukung serta upaya yang gencar dalam melakukan promosi wisata.



TUJUAN 5.2 : LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER UNGGUL

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



**SASARAN STRATEGIS 5.2.1
MENINGKATNYA AKSES LAYANAN BIDANG
PENDIDIKAN**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	15 tahun	14,96 tahun	99,73%
Rata-rata Capaian				99,73%

Sumber Data: Data BPS 2019

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 99,73%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**

18. Harapan Lama Sekolah

18.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

<i>Harapan Lama Sekolah</i>	=	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 14,96 tahun
-----------------------------	---	---

Sumber Data: Data BPS 2019

Tabel 18.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah	15	14,96	99,73%

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 15 tahun, dan terealisasi sebesar 14,96 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 99,73%. Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2019, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,96 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.



Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah;
2. SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah;
3. SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah;
4. Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi;

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini adalah dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

18.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	14,7	14,93	101,56 %
2017	14,8	14,94	100,94 %
2018	14,9	14,95	100,33 %
2019	15	14,96	99,73%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan meskipun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota pada tahun ini realisasinya berada sedikit dibawah target yang ditetapkan.

18.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi capaian indikator Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD :



Tabel 18.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Harapan Lama Sekolah	14,7	14,96	15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi tahun 2019 jika disandingkan dengan data awal tahun RPJMD mengalami kenaikan dari 14,7 menjadi 14,96 dan untuk akhir masa RPJMD akan ditingkatkan menjadi 15 tahun.

18.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen Walikota beserta jajarannya untuk senantiasa memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya dan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Dan tentunya kesadaran dan kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya Pendidikan sebagai Visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

18.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

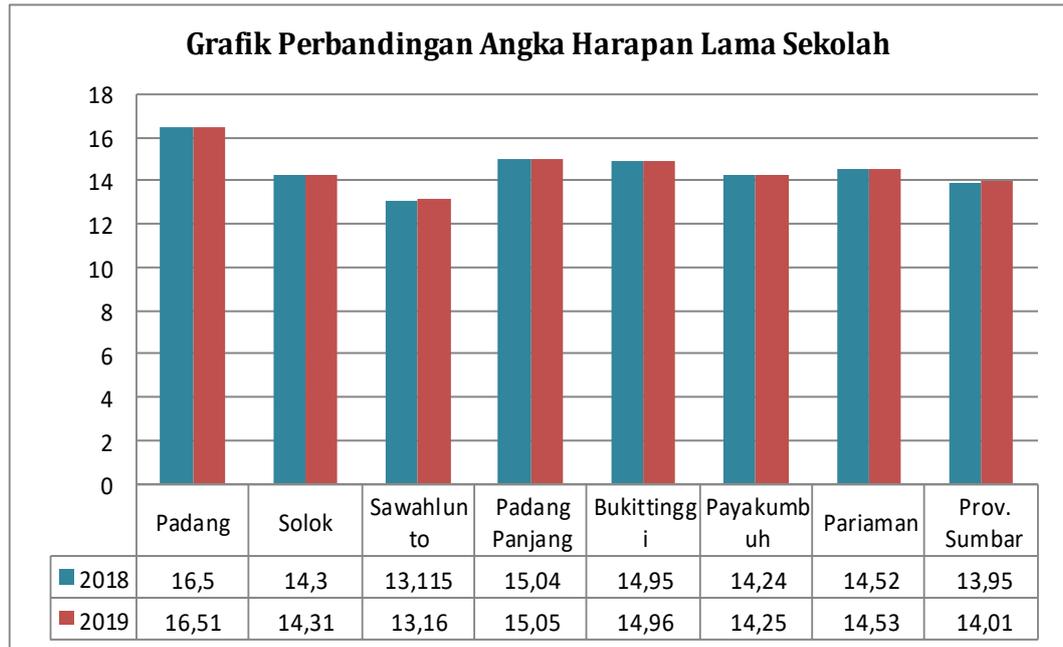
Dalam upaya efisiensi sumber daya, Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan memegang peran yang sangat penting. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya dan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Bukittinggi.

18.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program penunjang pencapaian indikator harapan lama sekolah ini diantaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program dan kegiatan penunjang pendidikan dengan telah dialokasikannya lebih dari 20% APBD untuk penunjang pendidikan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, disamping cukup besarnya dana transfer daerah dari APBN untuk pendidikan. Hal ini tergambar dari besarnya anggaran untuk pendidik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar Rp 186.982.002.574,-

18.7. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah dengan Kota Se-Sumatera Barat

Setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi berada pada urutan kedua Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 sebesar 14,95. Angka Harapan Lama Sekolah tidak bergerak naik dengan signifikan pada tahun 2019 yang hanya naik 0,1 poin menjadi 14,96. Target 15 Tahun pada akhir RPJMD masih menjadi target utama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan harapan dapat diwujudkan tanpa menghadapi hambatan dan kendala berarti.



19. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

19.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\text{Angka Rata-rata Lama Sekolah} = \frac{\text{Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.}}{11,32 \text{ tahun}}$$

Sumber Data: BPS 2019

Tabel 19.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka rata-rata lama sekolah	11,20	11,32	101,07%

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam



suatu wilayah. RLS Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sebesar 11,32 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,32 tahun atau hampir menamatkan kelas XII. Dibandingkan dengan target pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini sedikit melampaui target yaitu sebesar 11,32 tahun atau sekitar 101,07%.

19.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 19.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	10,85	10,98	101,20 %
2017	10,95	11,30	103,20 %
2018	11,05	11,31	102,35 %
2019	11,10	11,32	101,07 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Artinya secara rata-rata, dari tahun ke tahun minat dan keinginan masyarakat Kota Bukittinggi untuk melanjutkan pendidikan semakin tinggi.

19.3. Perbandingan Realisasi Capaian Target Dengan Target RPJMD

Tabel 19.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Angka Rata-rata Lama Sekolah Dengan Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,79	11,32	11,20

Dari tabel diatas, capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 11,32 tahun telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 11,20 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap berupaya agar angka rata-rata lama sekolah dapat terus dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi.

19.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Salah satu visi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah diwujudkan diantaranya melalui pengalokasian dana yang cukup besar untuk menunjang sektor ini. Semakin tingginya capaian rata-rata lama

sekolah di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 menunjukkan minat dan keinginan masyarakat Kota Bukittinggi yang semakin tinggi untuk melanjutkan dan meningkatkan pendidikan formal. Hal ini seiring dengan pembenahan di sektor pendidikan, pembenahan sarana dan prasarana serta kualitas mutu lainnya. Pemerintah Kota Bukittinggi selalu mendorong agar rapor mutu pendidikan selalu meningkat dan mencapai delapan standar mutu pendidikan.

19.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mendorong agar capaian indikator rata-rata lama sekolah ini semakin meningkat harus dilakukan berbagai pembenahan baik sarana, prasarana serta kualitas mutu pendidikan. Disamping anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pendidikan setiap tahunnya mencapai Rp 80.306.857.037,00 yang bersumber dari APBN maupun APBD. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di sektor pendidikan formal. Dari pagu anggaran sebesar Rp 80.306.857.037,00 terealisasi anggaran sebesar Rp 76.613.330.222,00 atau sekitar 95%.

Dengan realisasi anggaran sebesar 95% dari pagu yang disediakan, telah dapat dicapai capaian kinerja sebesar 102,50%. Hal ini berarti telah dapat dilakukan efisiensi anggaran namun dengan tetap memperhatikan kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi secara keseluruhan.

19.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Adapun program penunjang untuk pencapaian indikator ini diantaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program dan kegiatan penunjang pendidikan dengan telah dialokasikannya lebih dari 20% APBD untuk penunjang pendidikan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, disamping cukup besarnya dana transfer daerah dari APBN untuk pendidikan.



SASARAN STRATEGIS 5.3.1
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu
Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya
Kesehatan

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	73 tahun	74,22 tahun	101,67

Dari tabel diatas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 101,67%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

20. Angka Harapan Hidup**20.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Angka Harapan Hidup	=	$\frac{\text{Rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x.}}{74,22}$
---------------------	---	---

Sumber Data: Data BPS 2020

Tabel 20.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	73	74,22	101,67%

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



20.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 20.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Harapan Hidup		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	73,60	73,60	100%
2017	72,75	73,69	101,15%
2018	72,85	73,91	101,45%
2019	73	74,22	101,67%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

20.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 20.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Angka Harapan Hidup	72,36	73	74,22	73,14

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup Tahun 2019 dengan realisasi 74,22 tahun telah berada diatas target akhir RPJMD.

20.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2019 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 73 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 74,22 tahun dan menjadi salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101,67%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas



Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan.

Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

20.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Angka harapan hidup merupakan indikator dari tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka sasaran strategis dari dinas kesehatan mengacu pada pencapaian indikator meningkatnya harapan lama hidup.

Sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan terdiri dari tenaga medis dan tenaga paramedis yang ada baik di dinas maupun Puskesmas. Dari segi pembiayaan penyediaan anggaran serta penempatannya berorientasi pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

20.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya angka harapan hidup adalah :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya Kesehatan masyarakat adalah program untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) didalam gedung dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di luar gedung. Upaya Kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan pada 7 Puskesmas yang ada, pelayanan kesehatan P3K pada keramaian Kota, pelayanan ambulance siaga yang siap antar jemput pasien dari rumah menuju sarana pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memberlakukan pengobatan gratis bagi penduduk Kota Bukittinggi yang ditandai dengan KTP / Kartu Keluarga.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin sebanyak 9.618 orang, artinya seluruh warga Kota Bukittinggi sudah memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Akses kesehatan yang sudah baik di Kota Bukittinggi ditunjang oleh adanya 7 Puskesmas induk pada setiap Kecamatan di Kota Bukittinggi. Dari 3 Kecamatan



yang ada, 1 Puskesmas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 2 Puskesmas di Kecamatan Guguk Panjang dan 4 Puskesmas di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Disamping itu, pelayanan kesehatan juga dilengkapi dengan 14 Puskesmas Pembantu dan 26 Pos Kesehatan Kelurahan yang sudah ada pada setiap Kelurahan. Di Kota Bukittinggi terdapat 4 Rumah Sakit Umum, 2 Rumah Sakit Khusus, 115 Praktek dokter perorangan, 51 apotek dan pendukung lainnya. Untuk mobilisasi program kesehatan, pada 7 Puskesmas juga sudah ada Mobil Puskesmas keliling.

2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak adalah upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

- a. Memberikan pelayanan ibu hamil sesuai standar
- b. Memberikan pelayanan ibu bersalin sesuai standar
- c. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- d. Memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- e. Memberikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining)

3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Dalam hal mengatasi permasalahan gizi diantaranya masalah Kurang Energi Protein (KEP) pada balita, Stunting (anak pendek), kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA) dan mengatasi masalah Kurang Energi Kalori pada Ibu Hamil. Untuk meningkatkan status gizi masyarakat sudah dilakukan upaya pemberian makanan tambahan pada anak sekolah, pemberian makanan tambahan pada anak keluarga miskin, makanan tambahan pada anak baru masuk sekolah, makanan tambahan pada ibu hamil KEP, makanan tambahan pada balita KEP.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk menunjang seluruh program yang ada di Dinas Kesehatan khususnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program promosi ini berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, sosialisasi program yang dilaksanakan dengan metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Berupa penyuluhan melalui media, pemasangan baliho, running text,



pemasangan stiker, pencaangan program dan kegiatan lomba-lomba untuk memotivasi masyarakat dan kader-kader kesehatan.

Sebagai ujung tombak dari upaya promosi kesehatan, pada setiap Kelurahan sudah ada Posyandu sebanyak 133 Posyandu, kader-kader kesehatan, kader Pos kesehatan Kelurahan sebanyak 33 buah dan PKK kelurahan yang bisa bekerja sama dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

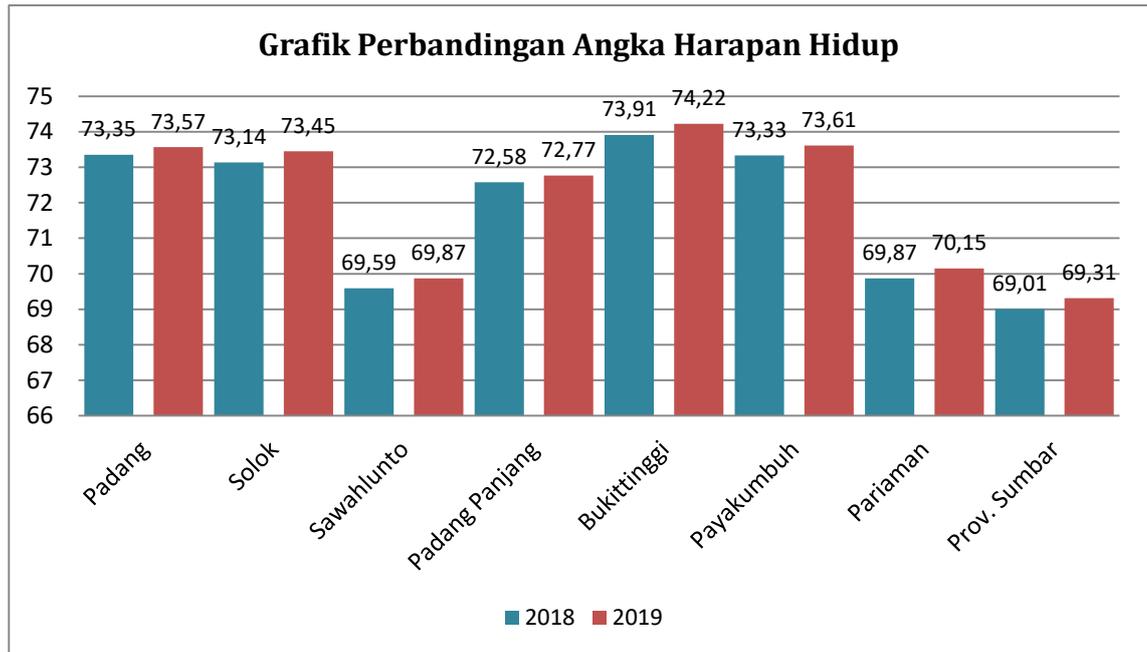
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah upaya untuk mempertahankan kesehatan usia lanjut sehingga dapat mandiri dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan prioritas pada lanjut usia di Puskesmas, mengaktifkan Posyandu Lansia sebagai wadah dalam menggerakkan Lansia untuk menjaga kesehatannya, melaksanakan senam lansia rutin setiap minggu pada setiap Puskesmas.

20.7. Perbandingan Angka Harapan Hidup dengan Kota Se Sumatera Barat

Kota	Tahun 2018	Tahun 2019
Padang	73,35	73,57
Solok	73,14	73,45
Sawahlunto	69,59	69,87
Padang Panjang	72,58	72,77
Bukittinggi	73,91	74,22
Payakumbuh	73,33	73,61
Pariaman	69,87	70,15
Prov. Sumbar	69,01	69,31

Sumber : Data BPS 2020

Membandingkan angka harapan hidup (AHH) Kota Bukittinggi dengan kota-kota di Sumatera Barat, Tahun 2018 angka harapan hidup Kota Bukittinggi 73,91. Angka tersebut menunjukkan angka tertinggi jika dibandingkan dengan kota-kota di Sumatera Barat. Berlanjut untuk tahun 2019, AHH Kota Bukittinggi terus meningkat menjadi 74,22 dan masih menempatkan posisi sebagai kota dengan AHH tertinggi di Sumatera Barat.



TUJUAN 5.3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan ketiga pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.3.2
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.2, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.2

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Puskesmas Terakreditasi	80%	100%	125%



Dari tabel diatas dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 125%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

21. Persentase Puskesmas Terakreditasi

21.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Puskesmas yang terakreditasi} &= \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas Keseluruhan}} \times 100\% \\ &= \frac{7 \text{ puskesmas}}{7 \text{ puskesmas}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sumber Data: Dinas Kesehatan

Tabel 21.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Puskesmas Terakreditasi	80%	100%	125%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2019, untuk indikator Persentase Akreditasi Puskesmas capaian kinerja sudah mencapai 125%. Dimana semua Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi telah terakreditasi dengan predikat sebagai berikut:

Tabel 21.1.2 Predikat Puskesmas Terakreditasi

No	Puskesmas	Predikat
1	Puskesmas Guguk Panjang	Paripurna
2	Puskesmas Rasimah Ahmad	Utama
3	Puskesmas Tigo Baleh	Madya
4	Puskesmas Mandiangin	Madya
5	Puskesmas Nilam Sari	Madya
6	Puskesmas Mandiangin Plus	Madya
7	Puskesmas Gulai Bancah	Madya

Sumber Data: Dinas Kesehatan

Akreditasi Puskesmas merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Komisi Akreditasi terhadap standar pelayanan di



Puskesmas. Akreditasi penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Dengan telah terakritisasinya semua Puskesmas di Kota Bukittinggi, dapat diartikan bahwa pelayanan yang diberikan di semua Puskesmas telah terstandarisasi sesuai dengan standar akreditasi. Dengan demikian diharapkan masyarakat merasa lebih nyaman dalam berobat ke Puskesmas karena kualitas pelayanannya telah meningkat.

21.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 21.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Puskesmas Terakreditasi		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	30%	28,57%	95,23%
2017	50%	71,43%	142,86%
2018	70%	100%	142,86%
2019	80%	100%	125%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dari Persentase Puskesmas Terakreditasi Kota Bukittinggi telah melampaui target yang ditetapkan sesuai target perjanjian kinerja pada masing-masing tahun berjalan.

21.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 21.3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Tahun 2019 dengan Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Persentase Puskesmas Terakreditasi	30%	80%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD sebesar 30%, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dan telah dapat mencapai target akhir RPJMD.

21.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini, tidak terlepas dari dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan terutama Walikota Bukittinggi yang cukup *concern* terhadap masalah kesehatan di Kota Bukittinggi. Disamping itu keterlibatan semua sektor juga ikut mendukung pencapaian, diantaranya Dinas Kesehatan sebagai instansi pembina dan pendamping, kecamatan, kelurahan, kader-kader di masing-masing wilayah kerja Puskesmas.

21.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas ini agar Puskesmas dapat melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan telah membentuk Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dan juga Tim Pembina Akreditasi Puskesmas. Tim Pendamping ini bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap Puskesmas yang akan diakreditasi pada tahun yang bersangkutan. Pendampingan ini dilakukan secara intens oleh ASN yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan untuk Pendamping Akreditasi Puskesmas.

Tim Pembina terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang berada di Dinas Kesehatan dan bertugas untuk melakukan pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pada saat pelaksanaan akreditasi Puskesmas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

21.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program yang menunjang untuk pelaksanaan akreditasi ini adalah program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Persiapan Akreditasi Puskesmas serta kegiatan Akreditasi Puskesmas dengan sumber dana dari DAK Akreditasi Puskesmas.



SASARAN STRATEGIS 5.3.3
Terkendalnya Jumlah Penduduk



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,52	95,17 %

Dari tabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 92,17 %. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **sangat baik**.

22. Laju Pertumbuhan Penduduk

22.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Laju Pertumbuhan Penduduk	=	Perubahan Jumlah Penduduk di Suatu Wilayah Tertentu Setiap Tahunnya
	=	1,55

Sumber Data: BPS 2019

Tabel 22.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,55	93,11 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,55. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 1,45, maka laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Dari realisasi sebesar 1,55, sesuai dengan *range* yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, maka pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi termasuk pada kategori Sedang (1-2%).

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk akan selalu mengalami pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Ditambah lagi oleh faktor Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan di Sumatera Barat sehingga menjadi kota tujuan oleh penduduk wilayah sekitar untuk tinggal dan menetap dalam rangka mencari nafkah.



22.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 22.2.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2016	1,71	1,71	100%
2017	1,60	1,68	95%
2018	1,55	1,56	99,35%
2019	1,45	1,55	93,11%

Dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dalam 3 tahun terakhir, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bukittinggi belum dapat mencapai target namun telah mendekati target yang ditetapkan setiap tahunnya dan menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun.

22.3. Perbandingan Realisasi Capaian Target Dengan Target RPJMD

Tabel 22.3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Target Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Target RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2019	KONDISI AKHIR RPJMD
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	1,55	1,38

Dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD yang berada pada angka 1,71, saat ini laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi sudah berada di angka 1,55. Namun jika dibandingkan dengan kondisi akhir, Kota Bukittinggi masih harus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu pada angka 1,38.

22.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya:

1. Memfasilitasi alat dan kontrasepsi secara gratis;



2. Melakukan pelayanan berkala di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak yang dikerjasamakan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Lapangan KB (IpeKB), TNI dan Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
3. Menyediakan biaya layanan kegagalan program KB;
4. Pemberian testimoni kepada calon akseptor oleh akseptor sukses;
5. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai model seperti KIE perorangan, KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE melalui mobil penerangan KB (MUPEN);
6. Memfasilitasi KIE KIT untuk kader, kelompok kegiatan dan Generasi Berencana (GenRe) KIT untuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) jalur pendidikan dan masyarakat;
7. Mengkampanyekan hindari 4 T melalui berbagai penyuluhan yaitu tidak melahirkan terlalu muda, tidak melahirkan terlalu tua, tidak melahirkan terlalu banyak, tidak melahirkan terlalu rapat;
8. Mengembangkan program Ketahanan Remaja melalui kegiatan PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat dengan konsentrasi program Tidak Menikah di Usia Dini, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, Memberikan Pemahaman Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
9. Mengembangkan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
10. Menggerakkan kampung KB; dan
11. Membentuk dan mensosialisasikan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.

22.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian indikator, Pemerintah Kota Bukittinggi dibantu oleh Sumber Daya Manusia di bidang KB yang mendukung upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu kader PPKBK, kader kelompok tani dan kader Pokja Kampung KB yang senantiasa berupaya untuk mempromosikan mengenai berbagai program KB. Disamping itu, adanya kegiatan lintas sektor seperti program Kota Sehat dan Sekolah Keluarga ikut berperan dalam pencapaian indikator ini.

Namun disisi lain, kurangnya keberpihakan anggaran terhadap program KB serta adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan



Kesehatan yang menyatakan bahwa adanya pungutan biaya untuk pemasangan dan pencabutan IUD dan Implant, menyebabkan pencapaian indikator menjadi tidak maksimal. Begitu juga dengan sistem klaim BPJS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menurunkan motivasi tenaga medis dalam pelayanan KB.

Begitu juga dengan jumlah PLKB yang tidak sesuai dengan jumlah wilayah kerja, dimana seharusnya pada 1 kelurahan terdapat 1 PLKB sementara kondisi saat ini untuk 24 Kelurahan hanya ada 8 PLKB. Keterbatasan sumber daya PLKB tidak diiringi dengan dukungan operasional yang mencukupi dari APBD sehingga PLKB yang ada menjadi kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.

22.6. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Berikut ini merupakan program dan kegiatan penunjang pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana
 - a. Pelayanan KB Serentak dan komplikasinya
 - b. Penilaian dan Penghargaan KB Teladan Serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Provinsi
 - c. Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana
 - d. Operasional Distribusi Alokasi
 - e. Operasional Penggerakan Kampung KB
 - f. Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBK dan Sub PPKBK
 - g. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana
 - h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a. Fasilitasi Program Generasi Berencana
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a. Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - a. Manunggal KB Kesehatan
 - b. Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan
 - c. Pendataan Keluarga



d. Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a. Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (Poktan)

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk setiap kegiatan yang mendukung kinerja memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Berikut di sajikan Realisasi anggaran utama tahun 2019 yang mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019:

Pada tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setelah perubahan adalah sebesar Rp 891.197.754.148,88, dengan realisasi sebesar Rp.717.087.566.902,80 (80,64%).

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah	Realisasi	
	Anggaran	Keuangan	%
2	3	4	5
BELANJA	891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	80,46
BELANJA TIDAK LANGSUNG	324.905.946.697,61	306.939.664.039,58	94,47
Belanja Pegawai	303.919.313.975,61	293.106.428.610,00	96,44
Belanja Hibah	15.268.252.629,00	11.934.939.445,00	78,17
Belanja Bantuan Sosial	4.033.160.000,00	1.241.900.000,00	30,79
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	685.220.093,00	559.301.924,50	81,62
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	97.094.060,00	9,71
BELANJA LANGSUNG	566.291.807.451,27	410.147.902.863,25	72,43
Belanja Pegawai	45.031.380.635,00	39.471.245.963,00	87,65
Belanja Barang dan Jasa	217.181.335.983,27	182.690.201.803,46	84,12
Belanja Modal	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis yang diukur oleh 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.
2. Untuk pencapaian 14 (empat belas) sasaran strategis tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 891.197.754.148,88,-, dengan realisasi sebesar Rp. 717.087.566.902,80 (80,46%).
3. Kategori keberhasilan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 10 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori Memuaskan dengan capaian > 100%.
 - b. Sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori Sangat Baik dengan capaian >86% -100%.
 - c. Sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori Baik dengan capaian >56% -85,99%.
 - d. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori Kurang Baik dengan capaian ≤ 56%.



4. Sasaran strategis Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang diukur oleh indikator kinerja Peringkat LPPD berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 122,86%. Peringkat LPPD menggunakan perolehan peringkat pada tahun 2017 mengingat hingga saat ini baru penilaian atas LPPD tahun 2017 yang dirilis oleh Kemendagri.
5. Sasaran strategis Terpenuhinya RTH Kota yang diukur oleh indikator kinerja Persentase RTH berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar 49,41%.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP, diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai stakeholders. Beberapa langkah yang dilakukan untuk pencapaian kinerja dan implementasi SAKIP pada tahun 2019 diantaranya:

1. Membentuk Tim Implementasi SAKIP Kota Bukittinggi yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan Walikota sebagai penanggungjawab dan terdiri dari Bapelitbang pada kelompok kerja perencanaan dan pengukuran kinerja, Bagian Organisasi pada kelompok kerja pelaporan kinerja serta Inspektorat pada kelompok kerja evaluasi internal;
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen SAKIP serta berupaya agar terdapat keselarasan diantara dokumen-dokumen yang ada;
3. Melakukan rapat evaluasi bersama Tim Implementasi SAKIP dan SKPD untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
4. Melakukan peningkatan kapasitas Tim Implementasi SAKIP serta SKPD secara berjenjang mulai dari aparatur perencana sampai ke tingkat pimpinan SKPD sebagai pengambil keputusan.

Disamping itu Pemerintah Kota Bukittinggi juga berupaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, diantaranya:



1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
2. Menyempurnakan tujuan, sasaran, indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerangka berpikir logis dengan mempertimbangkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/638/AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
3. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
4. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Implementasi Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 untuk mengawal implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
5. Mengefektifkan pengawasan internal oleh Inspektorat.
6. Menyusun perjanjian kinerja sampai ke level individu/staf yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
7. Melakukan penyempurnaan dalam pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bukittinggi, 10 Maret 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2
2	Terlaksananya reformasi birokrasi	2	Nilai SAKIP	BB
		3	Peringkat LPPD	35
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75
		6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1524
3	Terpenuhinya RTH Kota	7	Persentase RTH	17%
4	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	8	Persentase fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	75%
5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9	Cakupan akses air minum layak	95%
6	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10	Luas Kawasan Kumuh	0
		11	Persentase sanitasi layak	100
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	70
8	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13	Pertumbuhan ekonomi	6,40%
		14	PDRB Perkapita	54,50 juta
		15	Indeks Gini	<0,3
9	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16	Tingkat Kemiskinan	3,35
10	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17	Kunjungan Wisatawan	588.245 orang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
11	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18	Harapan lama sekolah	15
12	Meningkatkan kualitas pendidikan	19	Angka rata-rata lama sekolah	11,20 tahun
13	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	20	Persentase puskesmas terakreditasi	100%
14	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	21	Angka harapan hidup	73
15	Terkendalinya jumlah penduduk	22	Laju pertumbuhan penduduk	1,45

Bukittinggi, Maret 2019



WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. Ramlan Nurmatias
M. RAMLAN NURMATIAS